KABUPATEN TANGERANG

RESUME ANALISIS STATISTIK SEKTORAL

Informasi Statistik Sektoral Diskominfo Kabupaten Tangerang



Penyusun : Bidang Statistik Sektoral

statistik@tangerangkab.go.id

https://statistik.tangerangkab.go.id/

BUPATI TANGERANG



AHMED ZAKI ISKANDAR, B.Bus., S.E., M.Si

WAKIL BUPATI TANGERANG



H. MAD ROMLI, S.H., M.M

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGERANG



DRS. H. MOCH MAESYAL RASYID, M.Si

ANALISIS STATISTIK SEKTORAL KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2017-2019

Ukuran Buku : 21 cm x 15 cm
Jumlah Halaman : vii + 36 halaman

Penyusun:
Bidang Statistik Sektoral
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang

Diterbitkan oleh:
©Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang 2020

Sambutan Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Tangerang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Kami menyambut baik atas tersusunnya buku Analisis Statistik Sektoral Kabupaten Tangerang Tahun 2017-2019 oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang. Buku Analisis Statistik Sektoral Kabupaten Tangerang Tahun 2017-2019 ini merupakan data dan fakta berupa aspek administrasi pemerintahan, kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, sosial, ekonomi, infrastruktur, kependudukan dan geografi yang berkaitan dengan pelayanan publik di Kabupaten Tangerang yang di himpunan dari berbagai Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang yang disajikan dalam bentuk pemaparan grafik, sehingga kebijakan maupun kegiatan pembangunan diharapkan akan lebih tepat sasaran.

Kami berharap agar Analisis Grafik Data Sektoral Kabupaten Tangerang Tahun 2017-2019 ini sebagai gambaran dari hasil pelaksanaan kegiatan pemerintah dalam melaksanakan tugasnya, selain itu juga sebagai evaluasi kegiatan pembangunan yang diperlukan untuk pelaporan, monitoring dan perencanaan pembangunan yang akan datang. Kepada semua pihak yang telah berperan secara aktif dalam upaya penyelesaian penyusunan buku Analisis Statistik Sektoral Kabupaten Tangerang Tahun 2017-2019 ini kami sampaikan ucapan terima kasih dan semoga dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan data sektoral khususnya di Kabupaten Tangerang untuk keperluan berbagai kegiatan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Tangerang, Desember 2020



Dra. Tini Wartini, M.Si.
Kepala Diskominfo Kab. Tangerang

Kata Pengantar

Dengan mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga buku Analisis Statistik Sektoral Kabupaten Tangerang Tahun 2017-2019 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Sebagaimana diketahui bahwa tujuan penyusunan buku Data Statistik Sektoral Kabupaten Tangerang adalah untuk mengetahui situasi, kondisi dan perkembangan yang terjadi di Kabupaten Tangerang sebagai gambaran hasil dari pembangunan yang telah dilaksanakan. Isi dari buku Data Statistik Sektoral Kabupaten Tangerang adalah data mengenai administrasi pemerintahan, kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, sosial, ekonomi, infrastruktur, kependudukan dan geografi yang dihimpun dari berbagai Perangkat Daerah.

Dibuatnya buku Analisis Statistik Sektoral Kabupaten Tangerang Tahun 2017-2019 ini sebagai jawaban atas semakin beragamnya kebutuhan data sektoral yang diperlukan untuk bahan perencanaan, pemantauan, evaluasi pembangunan dan mengambil keputusan, dimana Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Pelaksana Data Statistik Sektoral Kabupaten Tangerang sesuai dengan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 109 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Sususan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

Kami menyadari bahwa buku ini masih belum sempurna, maka kami mengharapkan kritik/saran/masukan yang membangun untuk hasil yang lebih baik pada tahun mendatang. Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tangerang yang telah membantu dan berperan serta dalam memberikan data dan informasi yang kami perlukan untuk penyusunan buku ini.

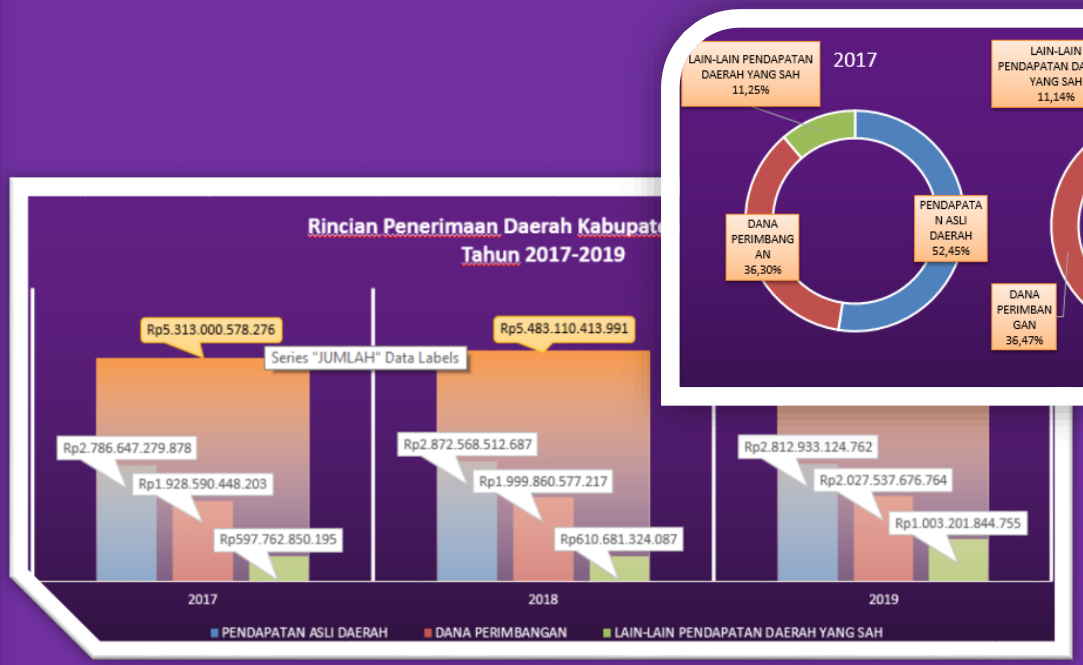


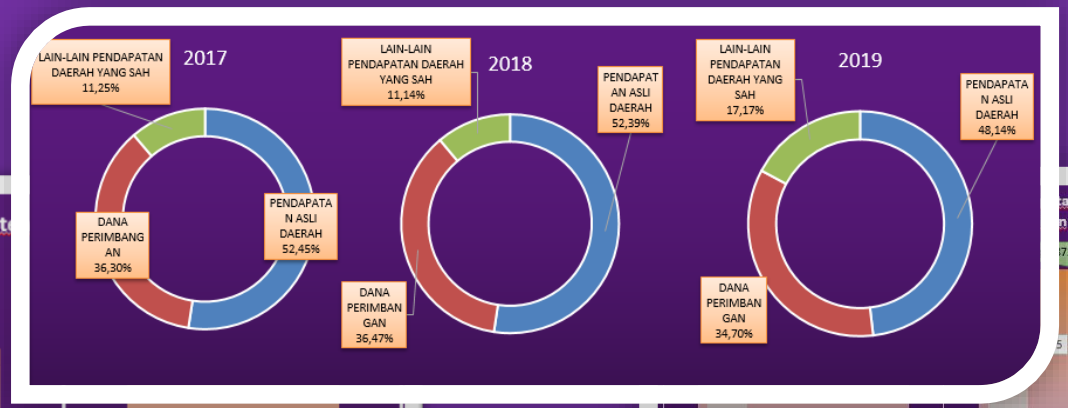
Bangbang Ismail, S.Sos., MAP.
Kepala Bidang Statistik Sektoral

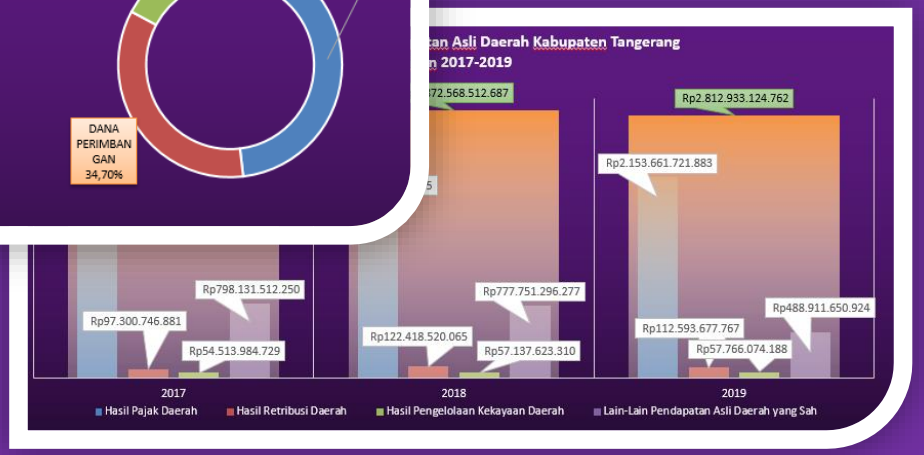
Daftar Isi

COVER	I
BUPATI TANGERANG & WAKIL BUPATI TANGERANG	ii
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGERANG	iii
SAMBUTAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TANGERANG	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I APA ITU STATISTIK SEKTORAL....	1
BAB II ANALISIS GRAFIK URUSAN KESEHATAN	14
BAB III ANALISIS GRAFIK URUSAN PENDIDIKAN	19
BAB IV ANALISIS GRAFIK URUSAN PEMUKIMAN	30
BAB V PENUTUP.....	35

BAB 1
Apa itu Statistik Sektoral?







Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik
2. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik
4. Permendagri no.86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
5. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Pemerintah Daerah
6. Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah
7. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 109 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Kabupaten Tangerang



Apakah Statistik Sektoral Itu?

Statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan. Statistik sektoral diselenggarakan oleh instansi pemerintah sesuai lingkup tugas dan fungsinya, secara mandiri atau bersama dengan Badan.



Siapa Penyelenggara Statistik Sektoral ?

Statistik sektoral diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya, secara mandiri atau melalui kerja sama.

Standar Penyelenggaraan Statistik Sektoral

1. Memiliki sumber daya manusia yang kompeten di bidang statistik
2. Memiliki sarana dan prasarana yang memadai
3. Menggunakan konsep definisi, metadata, dan metodologi statistik yang baku

Yang Terlibat Dalam Statistik Sektoral

1. Pembina Data Statistik Tingkat Kabupaten: BPS Kabupaten
2. Wali Data Tingkat Kabupaten : Diskominfo dan Bappeda Kab Tangerang
3. Produsen Data adalah PD Pemerintah Daerah Kab Tangerang

Bagaimana Cara Memperoleh Datanya?

Dalam menyelenggarakan statistik sektoral, instansi pemerintah memperoleh data dengan cara :



Survey



Kompilasi Produk Administrasi



Cara lain Sesuai Perkembangan IPTEK

Bagaimana Tahapan Penyelenggaraan Statistik Sektoral ?



Bagaimana Proses Penyebarluasan Data ?



1. Produsen Data wajib menyerahkan data hasil kegiatan Statistik Sektoral yang dilaksanakan kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang statistik sektoral.

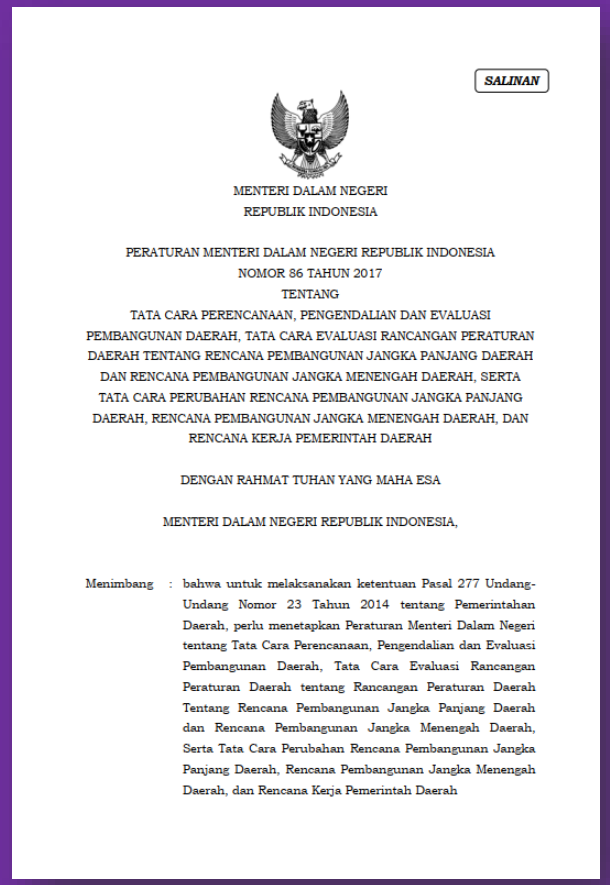


2. Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang Statistik Sektoral berperan dalam penyebarluasan Data Statistik Sektoral di lingkup Pemerintah Daerah



3. Data hasil kegiatan Statistik Sektoral terbuka pemanfaatannya untuk umum, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Urusan Apa Saja Yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten ?



SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 86 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH, TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH DAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH, SERTA TATA CARA PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH, RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH, DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

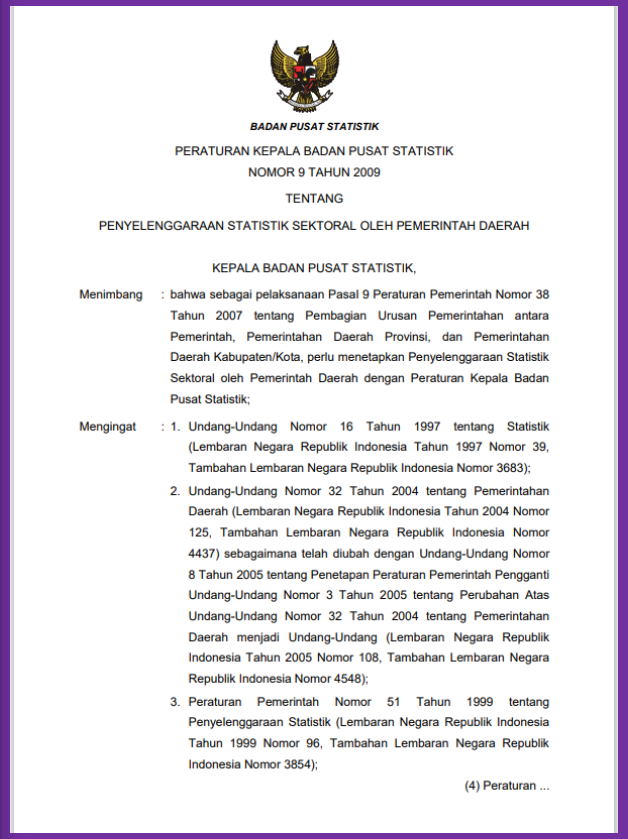
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 277 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Dalam Permendagri 86 tahun 2017 ada 33 urusan yang terbagi dalam 6 urusan Wajib Pelayanan Dasar, 18 urusan wajib non pelayanan dasar, dan 9 urusan pilihan dimana 4 urusan pilihan adalah kewenangan pemda provinsi. Dinas Komunikasi dan Informatika Kab Tangerang telah mengakomodir 19 urusan baik urusan wajib maupun pilihan dalam data statistik sektoral. Hal ini berarti data sektoral berdasarkan urusan telah mencapai 65,51% dari 29 urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang. Target di tahun 2021 diharapkan dapat mencapai 70% dari total 29 urusan tersebut.

Mengapa Statistik Sektoral Harus Dilaporkan?



BADAN PUSAT STATISTIK

PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 9 TAHUN 2009

TENTANG

PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL OLEH PEMERINTAH DAERAH

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);

(4) Peraturan ...

Karena menindaklanjuti Peraturan Kepala BPS Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah Pasal 24 disebutkan bahwa "Bupati/Walikota berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan Statistik Sektoral di daerahnya setiap tahun kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri dan Kepala BPS".

Pasal 24

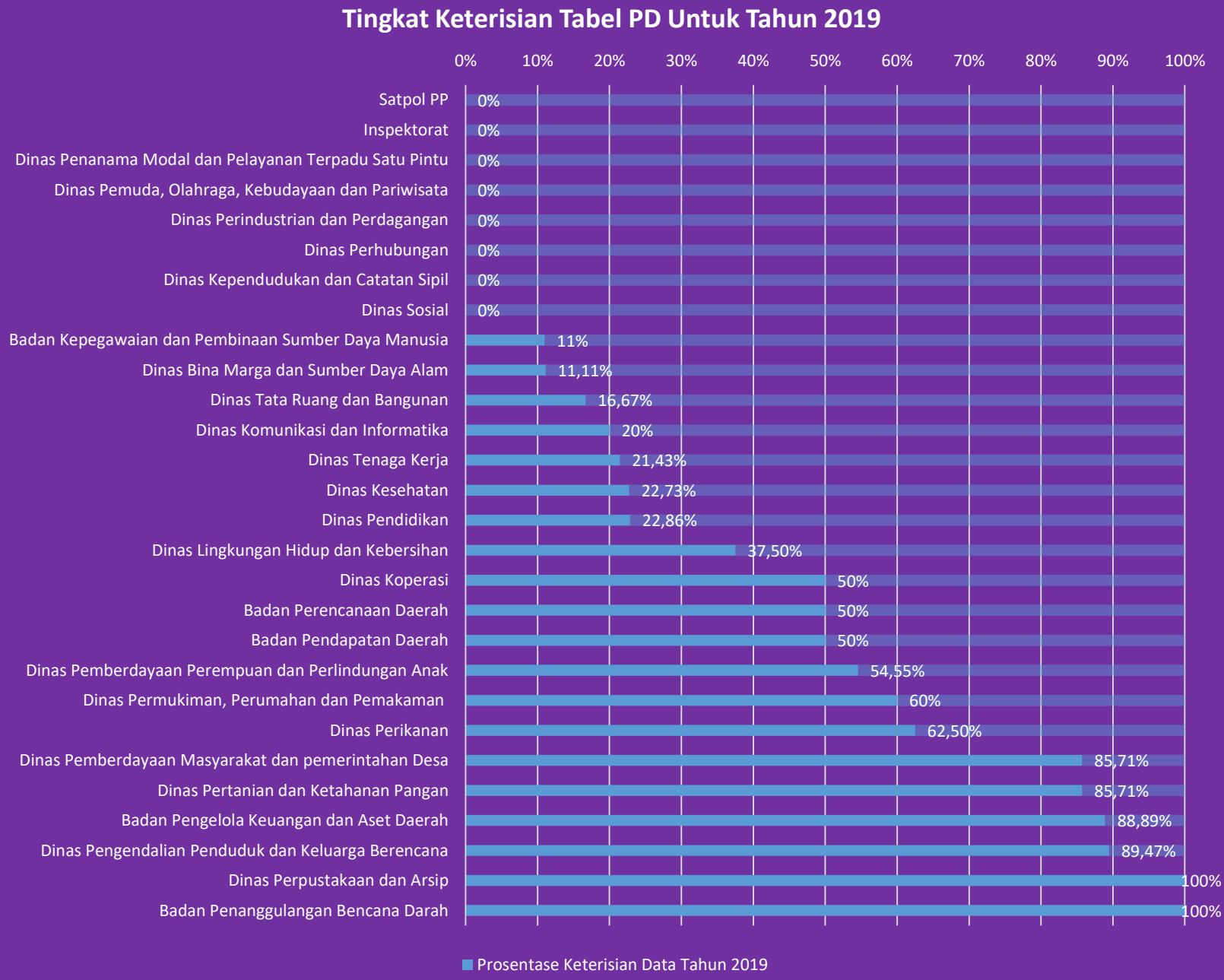
(1) Bupati/Walikota berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan statistik sektoral di daerahnya setiap tahun kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri dan Kepala BPS.

(2) Gubernur berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan statistik sektoral di daerahnya setiap tahun kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan Kepala BPS.

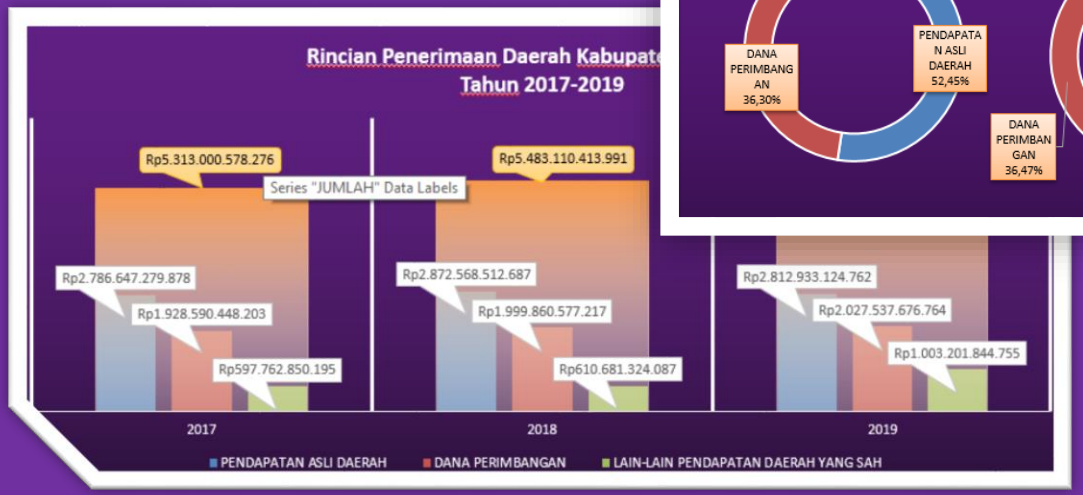
Berapa Banyak Tabel Yang Harus Diisi Untuk Seluruh Perangkat Daerah?

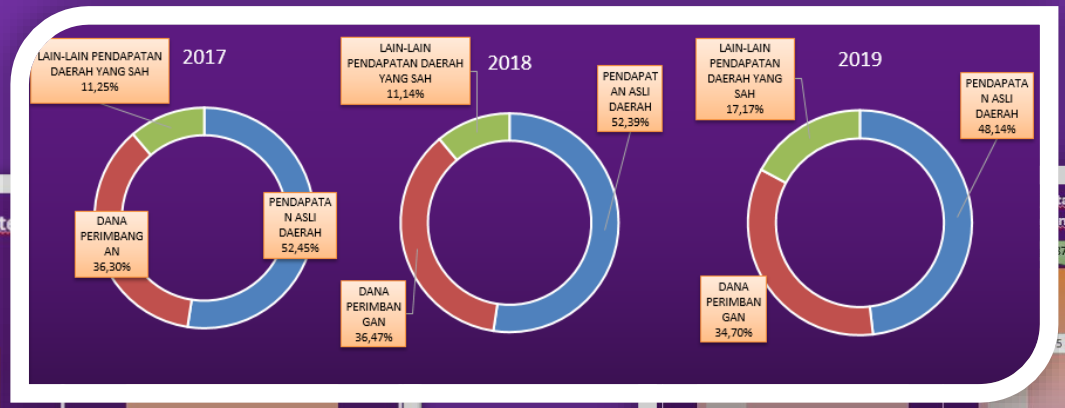
Berdasarkan hasil penelusuran dari beberapa Kabupaten/Kota, terdapat 464 Tabel pendukung data statistik sektoral. Namun berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017, terdapat 252 tabel yang wajib dipenuhi dan menjadi fokus pemenuhan tabel data statistik sektoral. Dari 252 tabel dimaksud, hasil pengumpulan dan pengolahan data statistik sektoral tahun 2020 melalui Bidang Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang untuk tahun 2019 adalah 37,3% dari target 25%. Sebagai perbandingan informasi bahwa pada tahun 2017 Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat yang mendapat Penghargaan Pangripta Nusantara (Penghargaan di bidang Perencanaan Pembangunan) tingkat nasional dari Bappenas pun hanya memiliki tingkat keterisian data 30%.

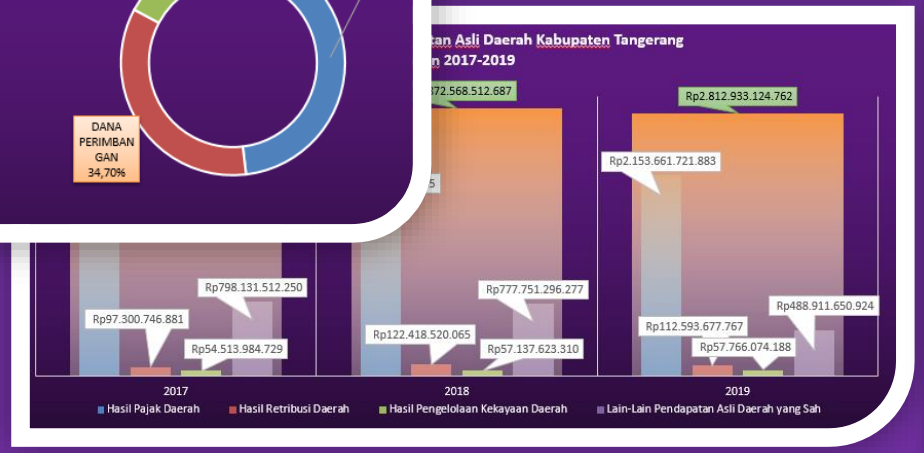
Bagaimana Keterisian Tabel Untuk Setiap Perangkat Daerah ?



BAB 2
ANALISIS GRAFIK
URUSAN KESEHATAN

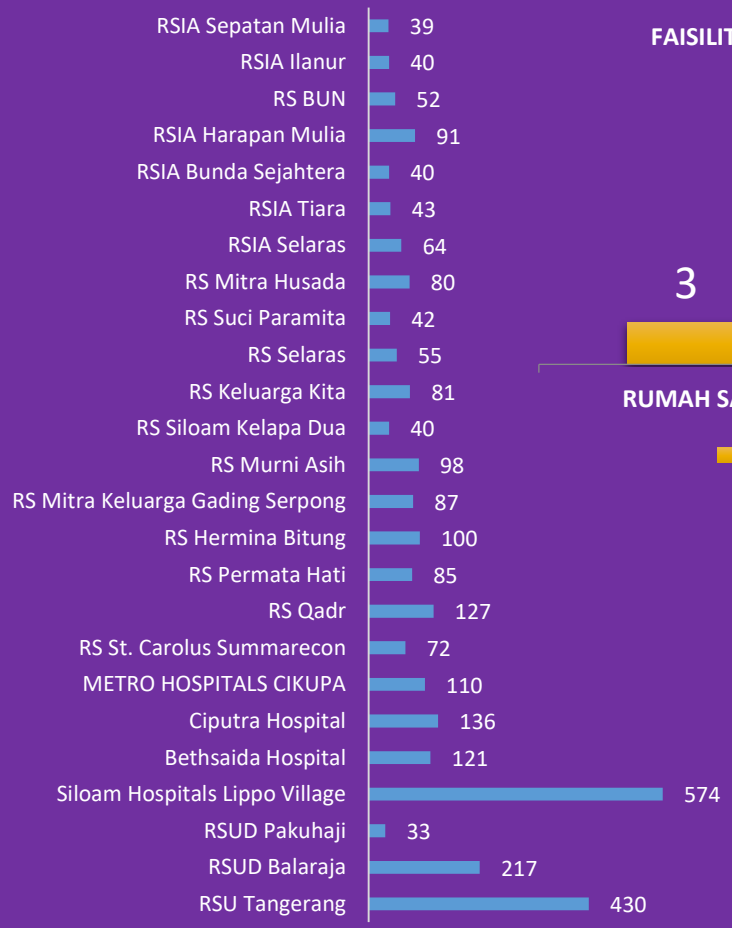




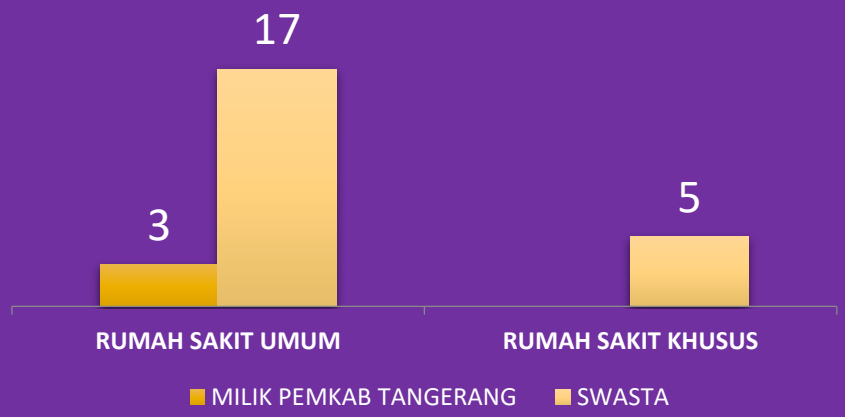


Rumah Sakit di Kabupaten Tangerang

KAPASITAS TEMPAT TIDUR



FAISILITAS RUMAH SAKIT DI KABUPATEN TANGERANG





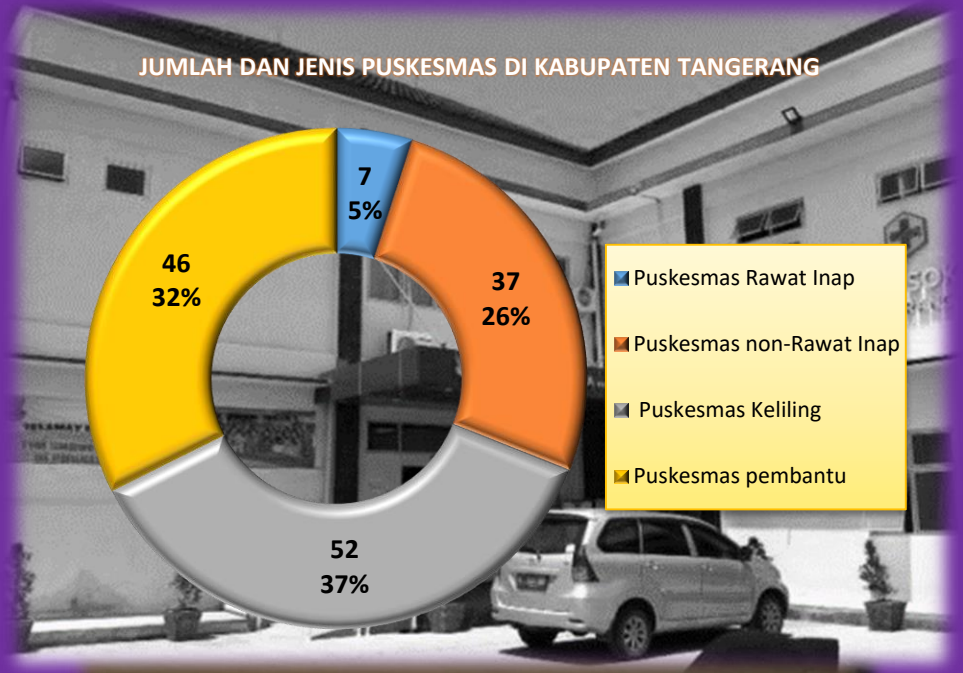
JUMLAH KUNJUNGAN PASIEN BARU RAWAT JALAN, RAWAT INAP, DAN KUNJUNGAN GANGGUAN JIWA DI SARANA PELAYANAN KESEHATAN TAHUN 2019

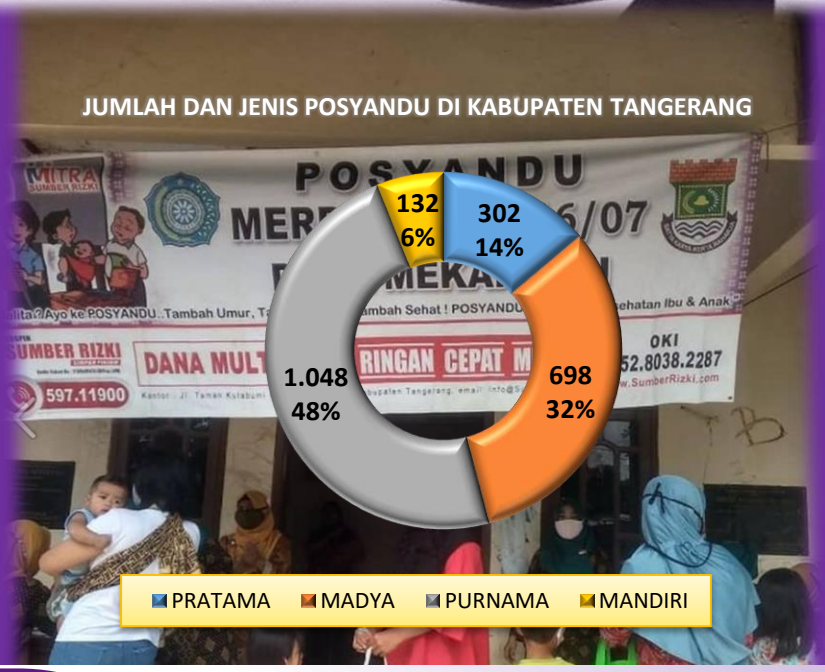


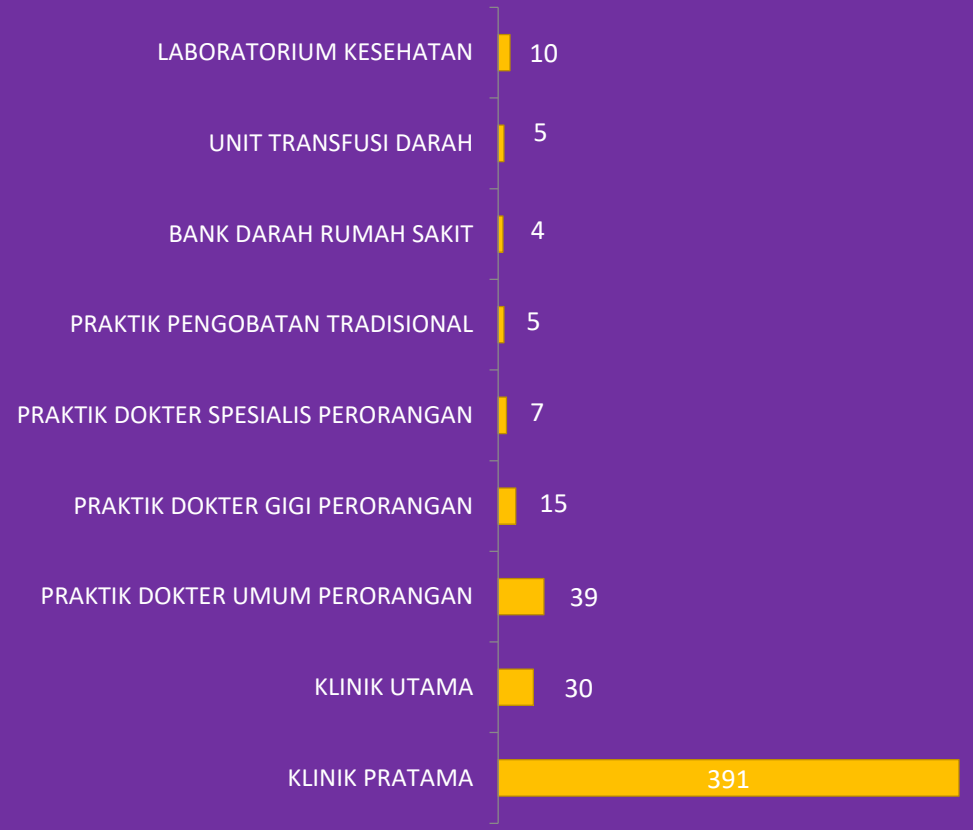
Kabupaten Tangerang memiliki 25 Rumah Sakit yang terdiri dari 20 Rumah Sakit Umum dan 5 Rumah Sakit Khusus. Kabupaten Tangerang memiliki 3 Rumah sakit Umum yaitu RSUD Pakuhaji, RSUD Balaraja dan RSU Tangerang. Ada dua rumah sakit yang memiliki kapasitas lebih dari 400 tempat tidur yaitu Siloam Hospital Lippo Village dan RSU Tangerang

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang Tahun 2019

FASILITAS KESEHATAN LAINNYA DI KABUPATEN TANGERANG



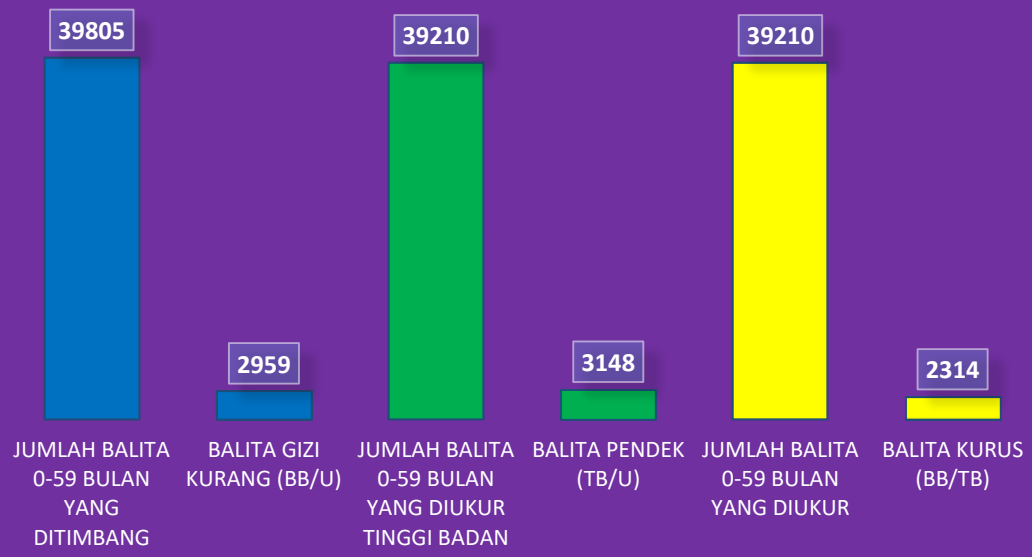


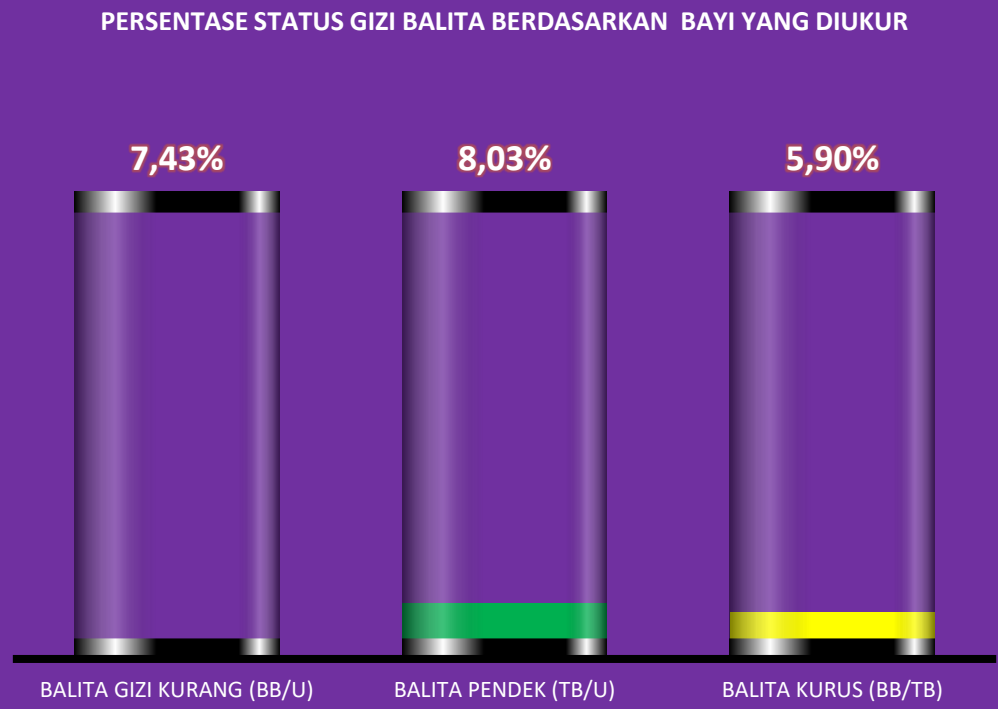


Sarana dan Prasarana Kesehatan selain Rumah Sakit di Kabupaten Tangerang cukup memadai. Kabupaten Tangerang memiliki Klinik Pratama cukup banyak yaitu sebanyak 391 klinik dan memiliki Puskesmas yang melayani Rawat Inap sebanyak 7 Puskesmas dan Sarana Layanan Kesehatan lainnya.

STATUS GIZI BALITA BERDASARKAN INDEKS BB/U, TB/U, DAN BB/TB DI KABUPATEN TANGERANG

STATUS GIZI BALITA BERDASARKAN INDEKS BB/U, TB/U, DAN BB/TB MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS

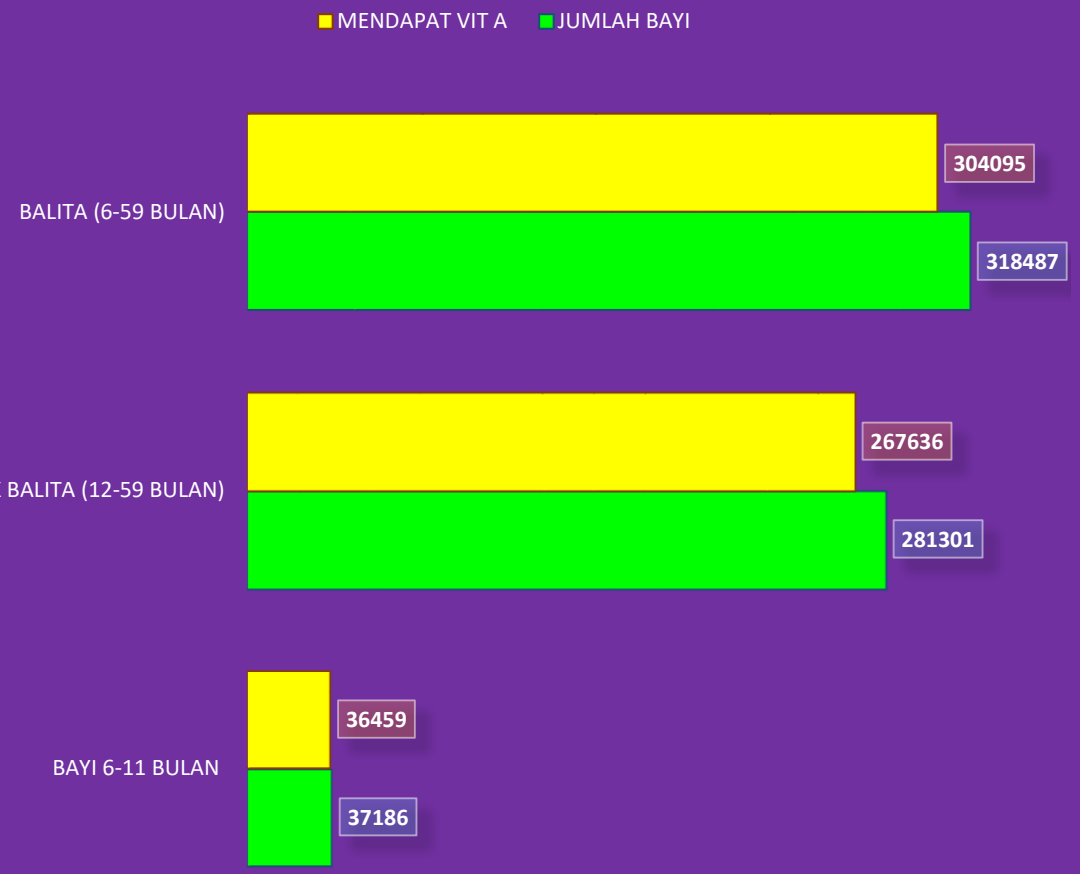


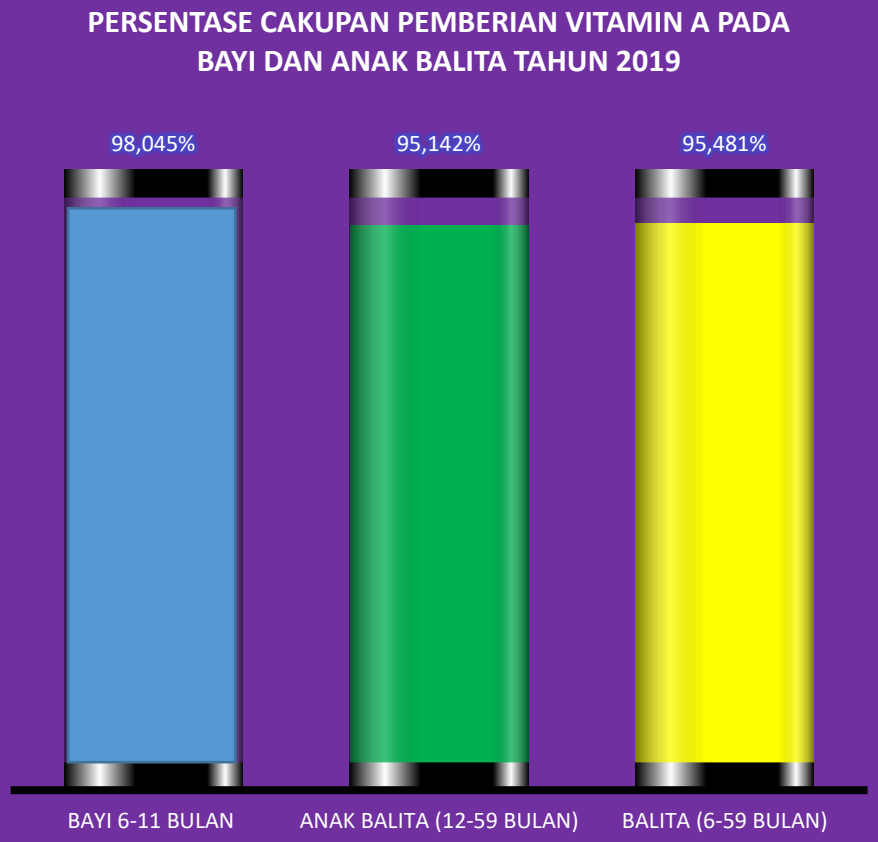


Di Kabupaten Tangerang Tahun 2019, berdasarkan sampel yang diukur masih terdapat Balita Gizi Kurang sebanyak 7,43% dari 39.805, sedangkan 8,03% dari 39210 bayi (sampel) yang diukur mengalami Balita Pendek. Dan yang mengalami Balita kurus sebanyak 5,90%.

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang Tahun 2019

CAKUPAN PEMBERIAN VITAMIN A PADA BAYI DAN ANAK BALITA TAHUN 2019



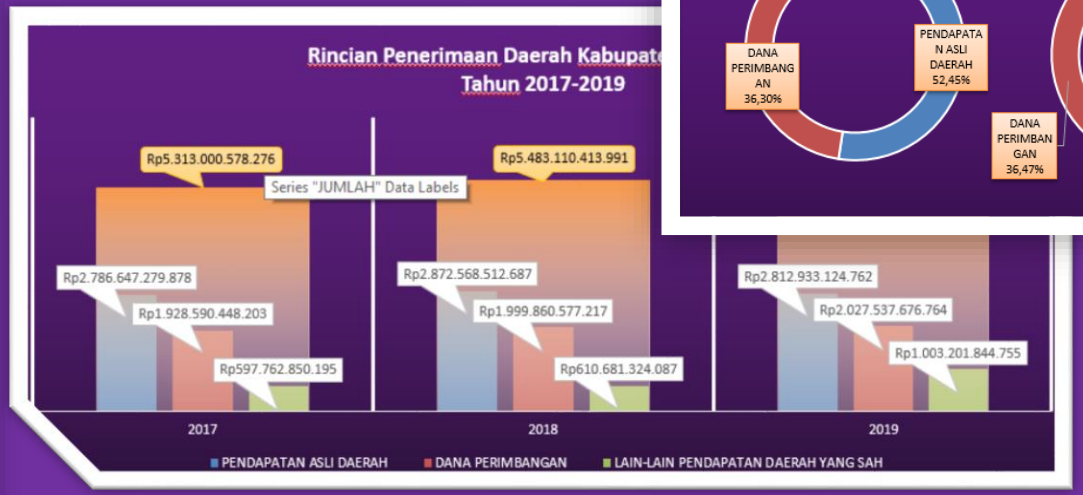


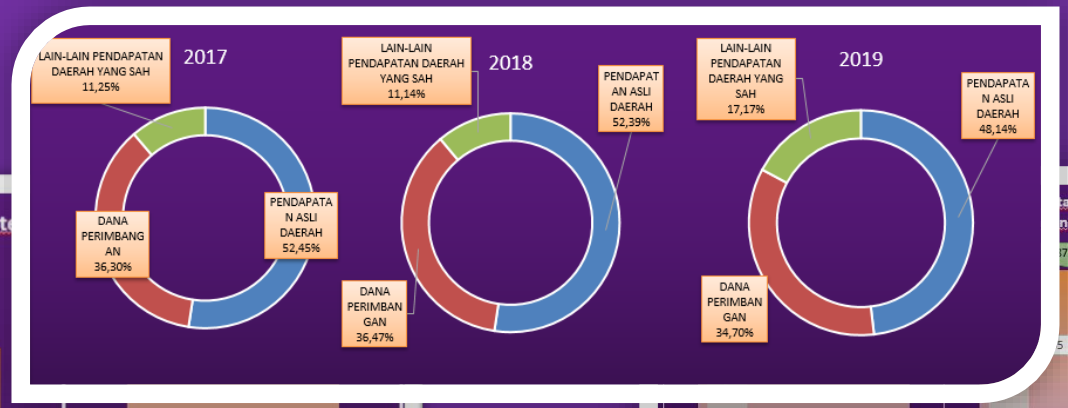
Di tahun 2019 sebanyak 95% lebih bayi dan balita di Kabupaten Tangerang sudah mendapatkan Vitamin A, bahkan untuk bayi yang usianya 6-11 bulan sebanyak 98,045% sudah mendapatkan vitamin A.

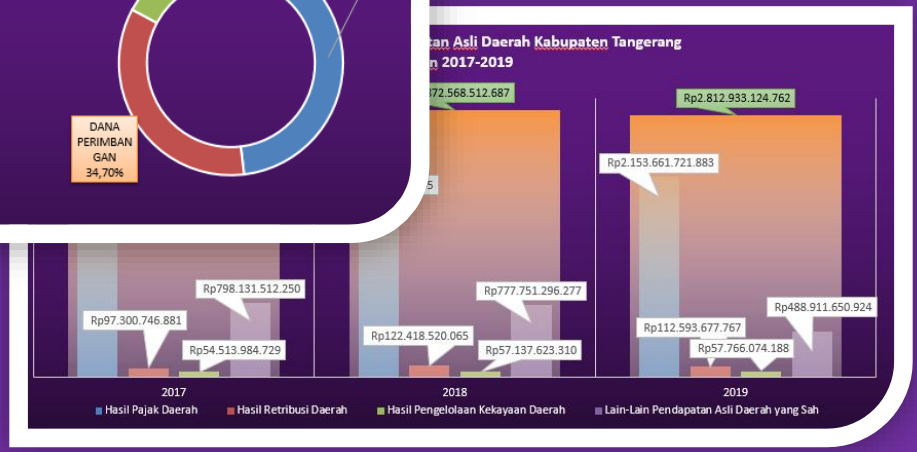
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang Tahun 2019

CAKUPAN PEMBERIAN VITAMIN A PADA BAYI DAN ANAK BALITA TAHUN 2019 DI KABUPATEN TANGERANG

BAB 3
ANALISIS GRAFIK
URUSAN PENDIDIKAN

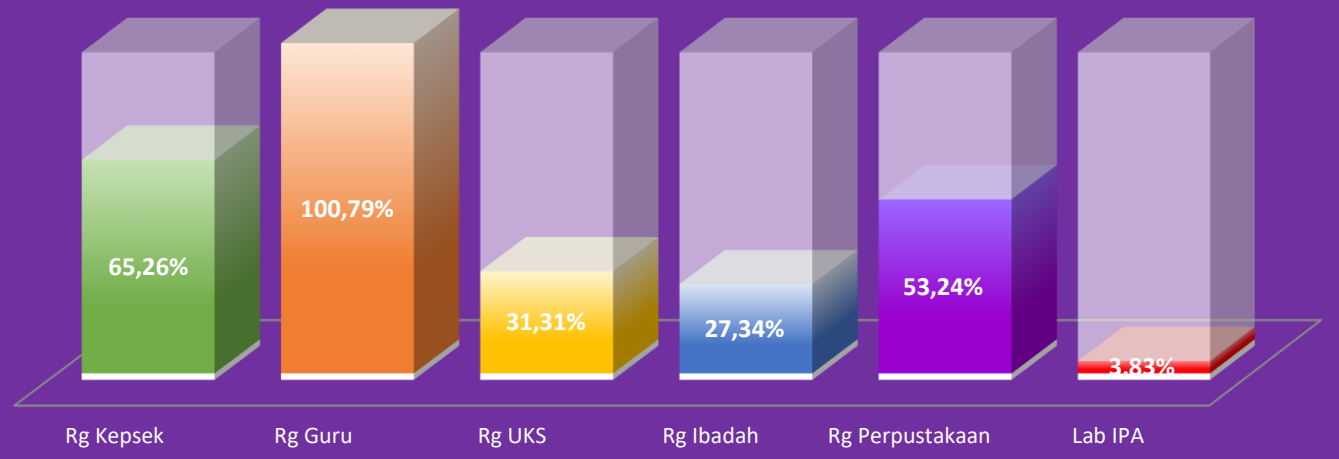




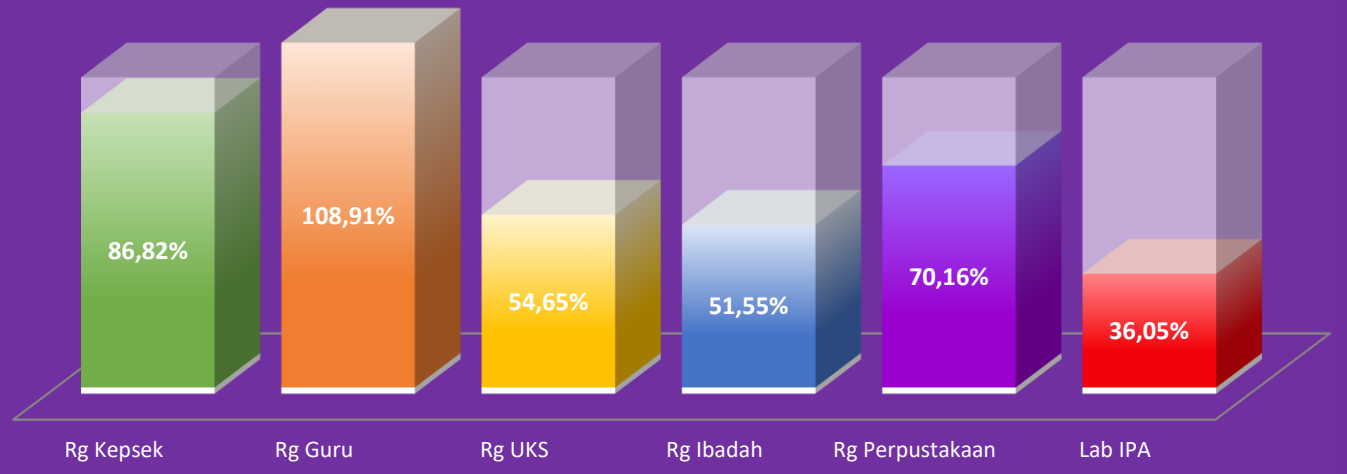


Jika dibandingkan antara SD Negeri dengan SD swasta berdasarkan persentase ketersediaan sarana prasarana masih memadai di SD swasta. SD Negeri yang memiliki fasilitas Lab. IPA baru 3,83 % dari seluruh sekolah negeri di Kabupaten Tangerang, serta yang memiliki ruang ibadah baru 27,34%. Jika dilihat secara umum dapat disimpulkan bahwa Sekolah Dasar di Kabupaten Tangerang untuk ketersediaan Lab IPA masih rendah.

Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Pada SD Negeri di Kabupaten Tangerang Tahun 2019



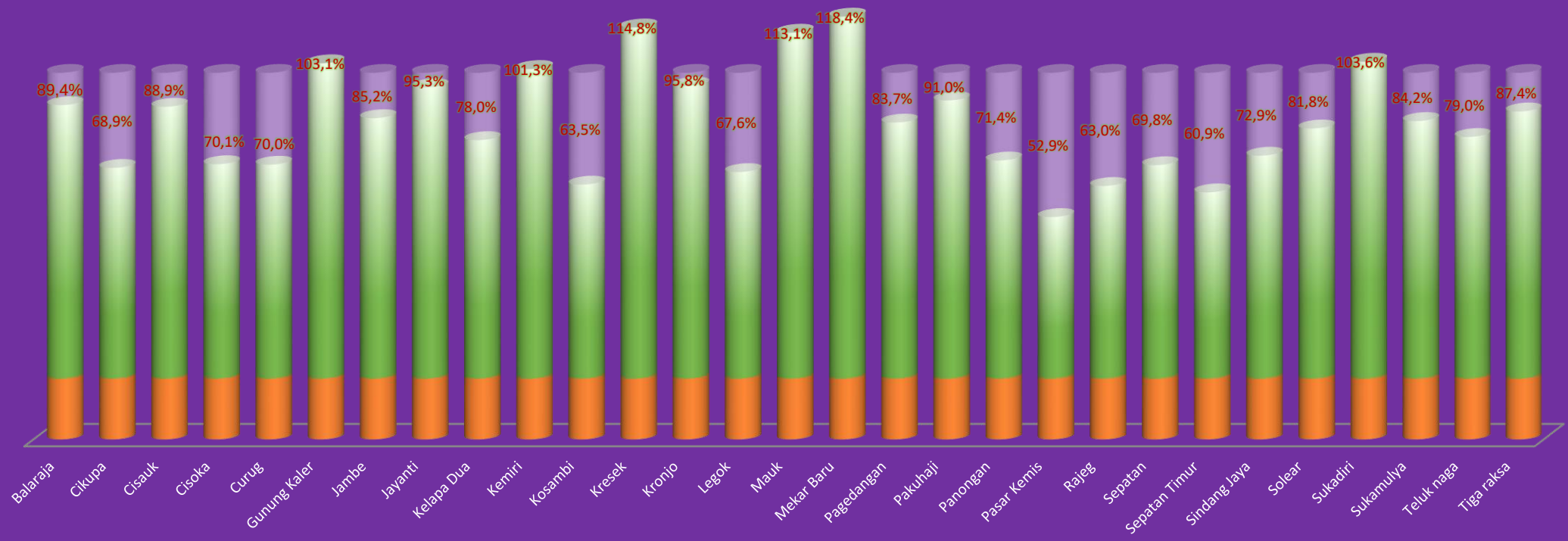
Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Pada SD Swasta di Kabupaten Tangerang Tahun 2019



Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Tahun 2019

PERSENTASE KETERSEDIAAN KURSI UNTUK PESERTA DIDIK DI SD NEGERI KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2019

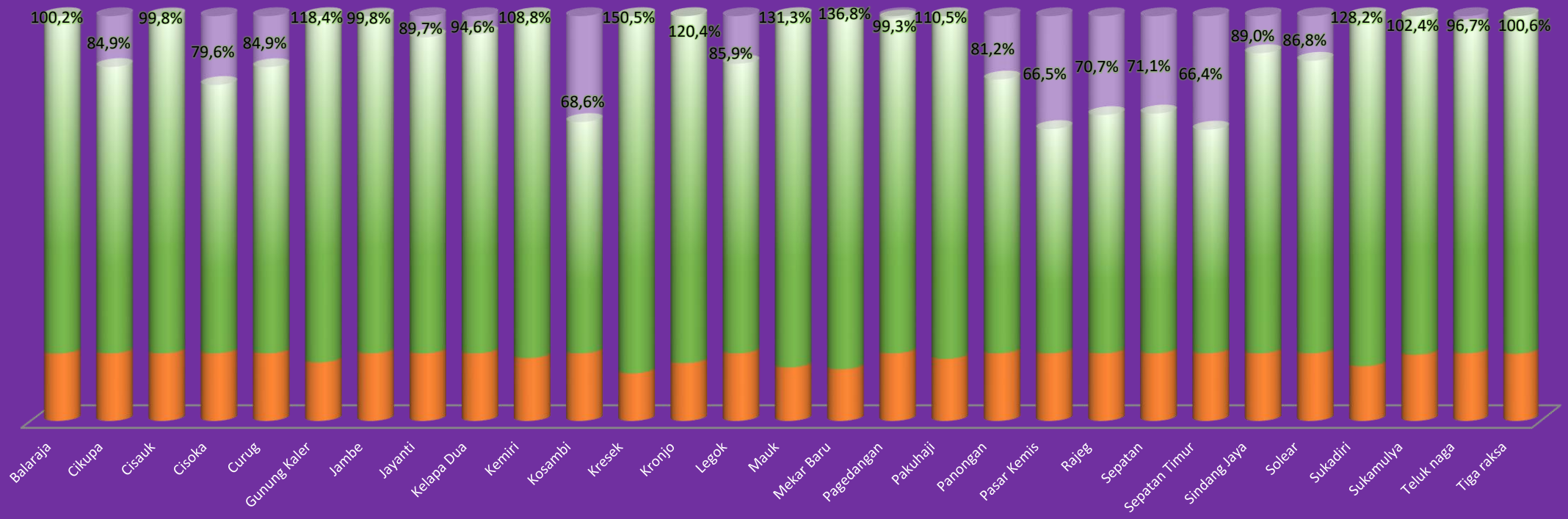
Persentase Ketersediaan Kursi Untuk Peserta Didik di SD Negeri Kabupaten Tangerang Tahun 2019



Jika dilihat dari grafik diatas, masih terdapat siswa SD Negeri di Kabupaten Tangerang yang belum memiliki kursi untuk belajar di kelas terutama untuk Kecamatan Pasar Kemis, baru 52,9 % yang siswa yang difasilitasi kursi. Sedangkan ada beberapa kecamatan yang jumlah kursinya berlebih seperti Kecamatan Gunung Kaler, Kresek, Mauk, Mekar Baru dan Sukadiri.

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Tahun 2019

Persentase Ketersediaan Meja (asumsi 1 meja untuk 2 siswa) Untuk Peserta Didik di SD Negeri Kabupaten Tangerang Tahun 2019

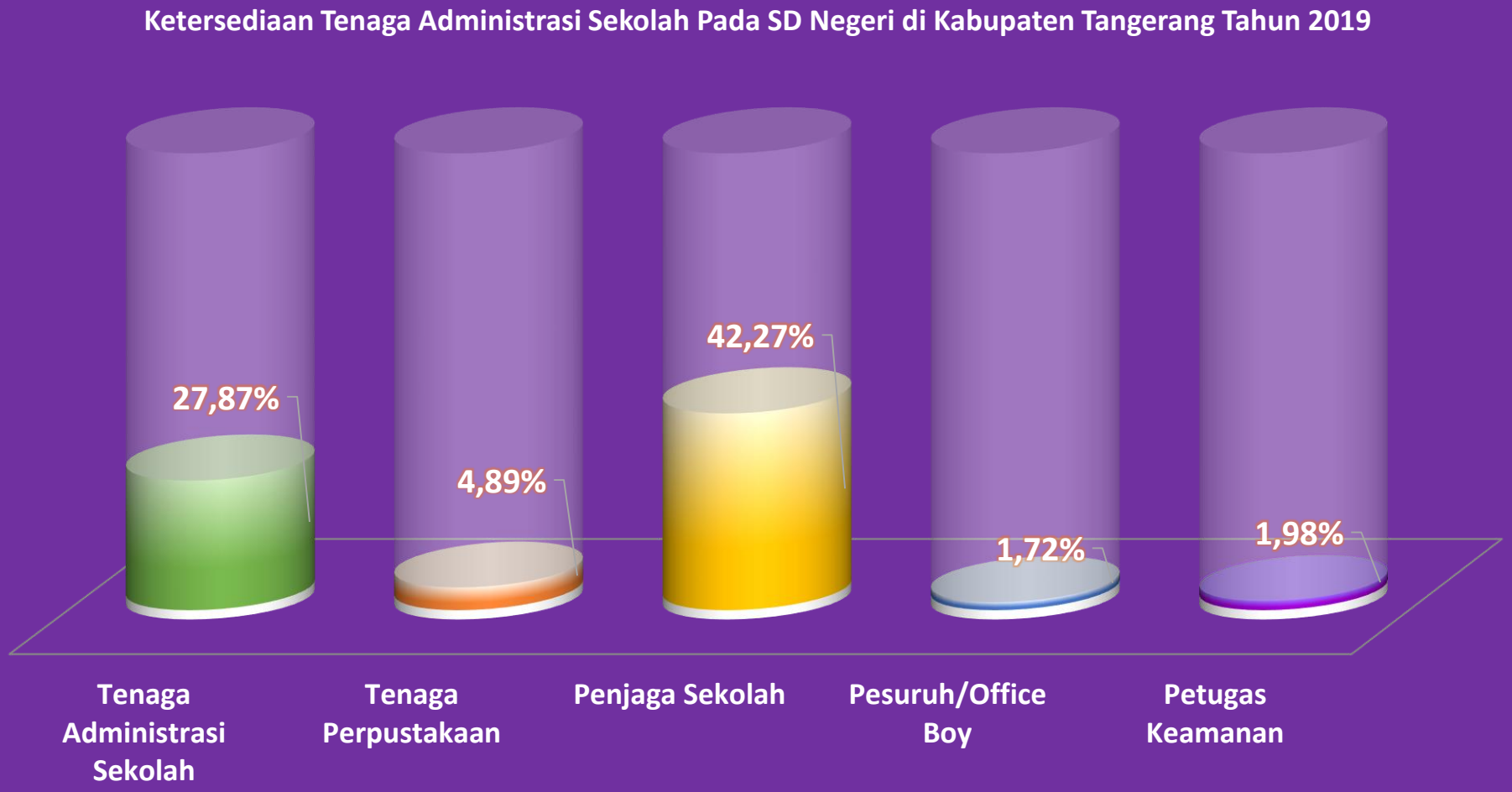


Masih terdapat sekolah yang kekurangan meja untuk proses pembelajran di tingkat Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Tangerang, Kecamatan Sepatan Timur dan Pasar Kemis hanya memenuhi 66 % dari kebutuhan meja siswa sedangkan ada beberapa kecamatan yang alokasi mejanya berlebih seperti sukadiri yang mencapai 128,2%.

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Tahun 2019

PERSENTASE KETERSEDIAAN MEJA UNTUK PESERTA DIDIK DI SD NEGERI KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2019

KETERSEDIAAN TENAGA ADMINISTRASI SEKOLAH PADA SD NEGERI DI KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2019

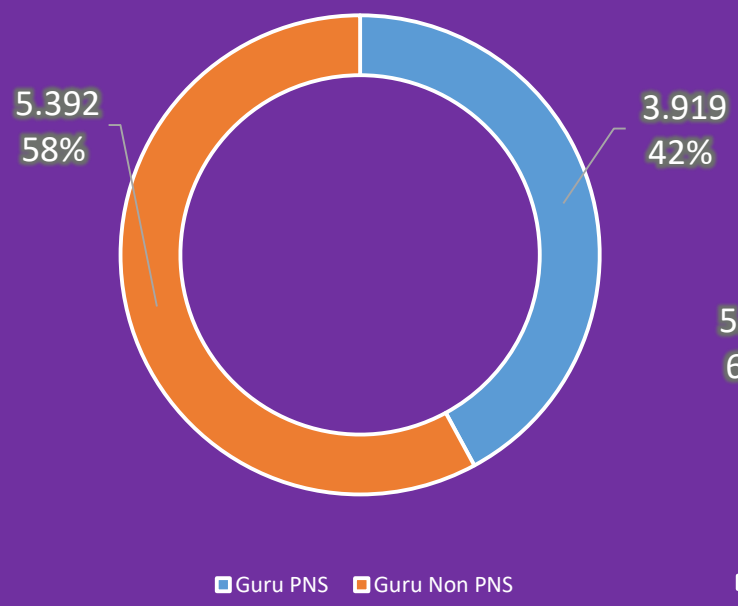


Ketersediaan Tenaga Administrasi Untuk Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Tangerang masih belum memadai, baru 27,87% sekolah yang memiliki Tenaga Administrasi Sekolah, 4,89 untuk Tenaga Perpustakaan seperti yang dapat dilihat pada grafik diatas.

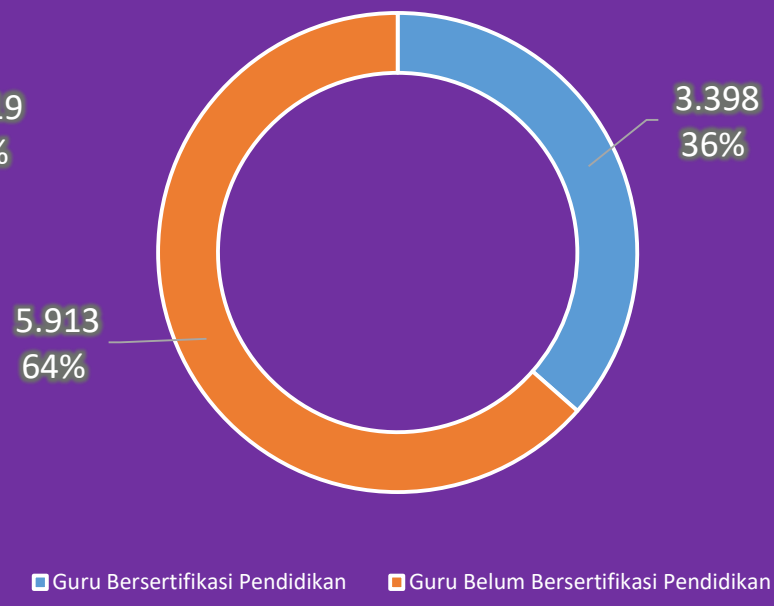
Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Tahun 2019

PROPFIL GURU SEKOLAH DASAR NEGERI DI KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2019

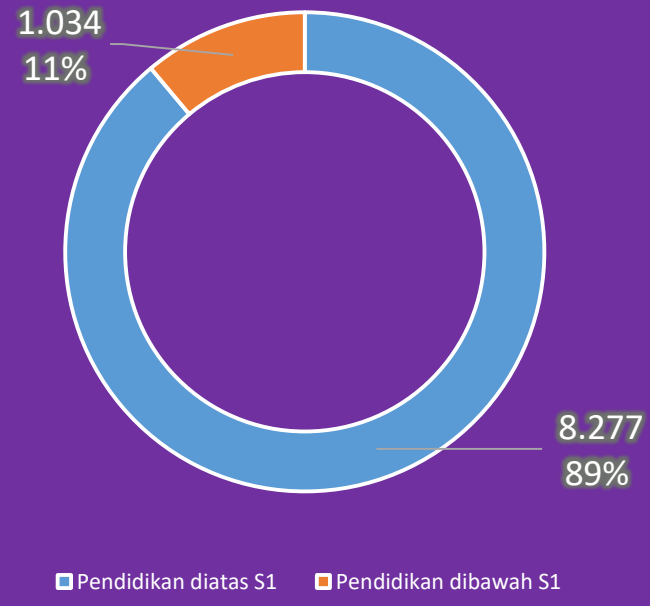
Status Kepegawaian Guru
Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Tangerang



Status Sertifikasi Guru
Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Tangerang



Status Pendidikan Guru
Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Tangerang

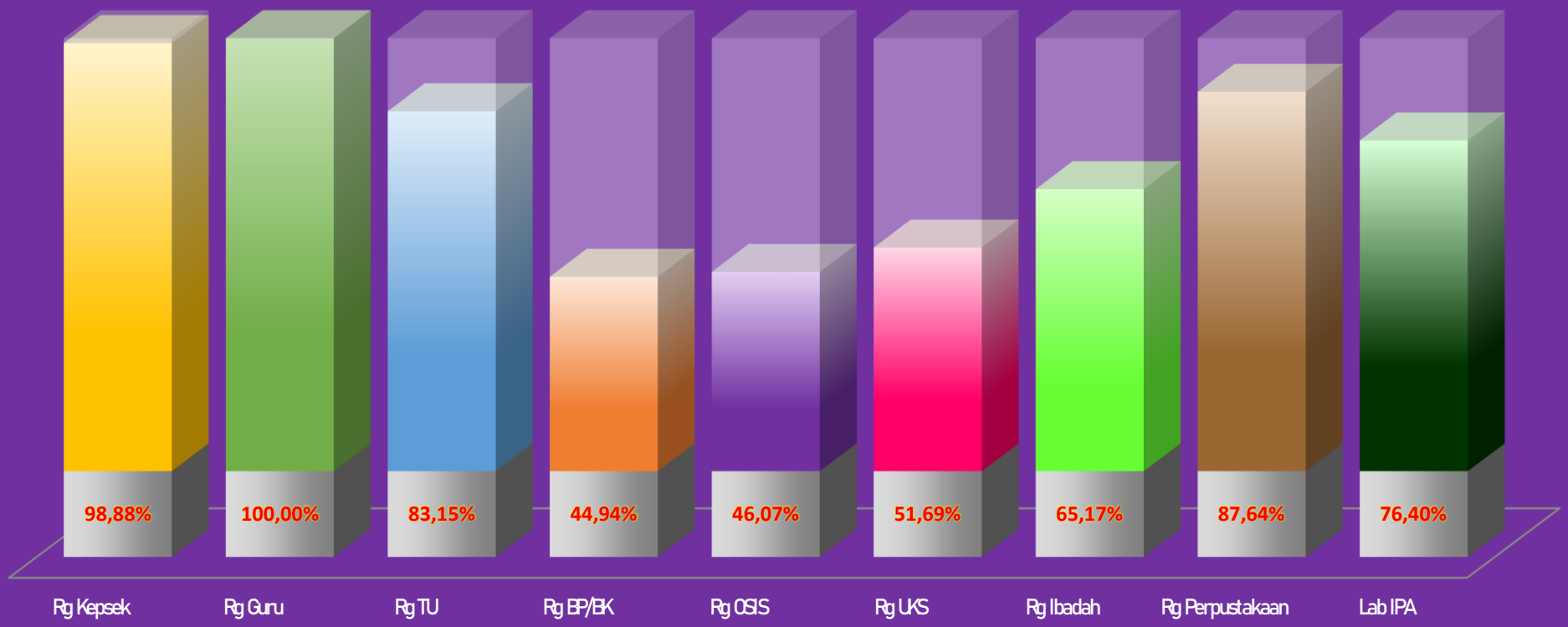


Guru sekolah Dasar Negeri Kabupaten Tangerang yang berstatus PNS mencapai 58 % sedangkan sisanya merupakan pegawai honorer sebesar 42 %. Selain itu guru yang bersertifikasi pendidikan baru mencapai 36% atau sebanyak 3.398 dari 9.311 guru Sekolah dasar Negeri. Di tahun 2019 masih terdapat guru yang belum memiliki ijazah S1 sebanyak 11 %.

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Tahun 2019

PERSENTASE KETERSEDIAAN SARANA PRASARANA PADA SMP NEGERI DI KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2019

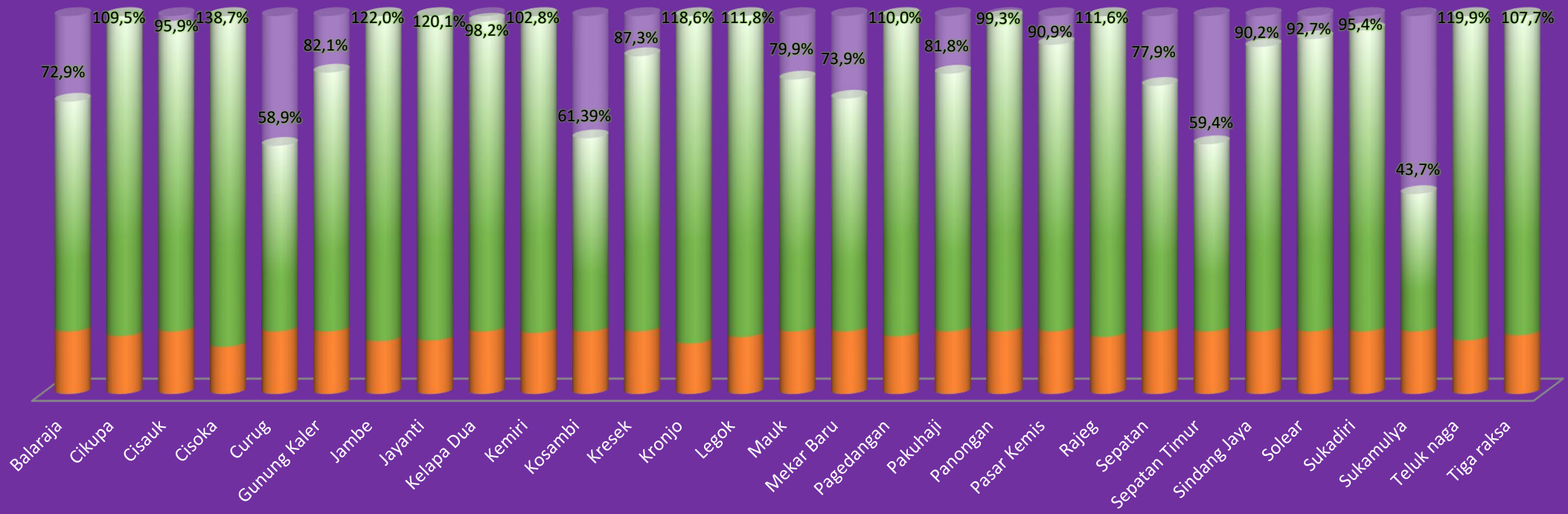
Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Pada SMP Negeri di Kabupaten Tangerang Tahun 2019



Ketersediaan sarana dan prasarana untuk SMP Negeri di Kabupaten Tangerang cukup memadai, walaupun perlu peningkatan di beberapa sarana penting seperti Lab IPA (76,40%) dan Ruang Ibadah (65,17%). Sebagian besar SMP di Kabupaten Tangerang belum memiliki Ruang BP/BK dan Ruang OSIS. Untuk ruang BP hanya 44,94 % sedangkan ruang OSIS hanya sebesar 46,07 %.

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Tahun 2019

Persentase Ketersediaan Kursi Untuk Peserta Didik di SMP Negeri Kabupaten Tangerang Tahun 2019



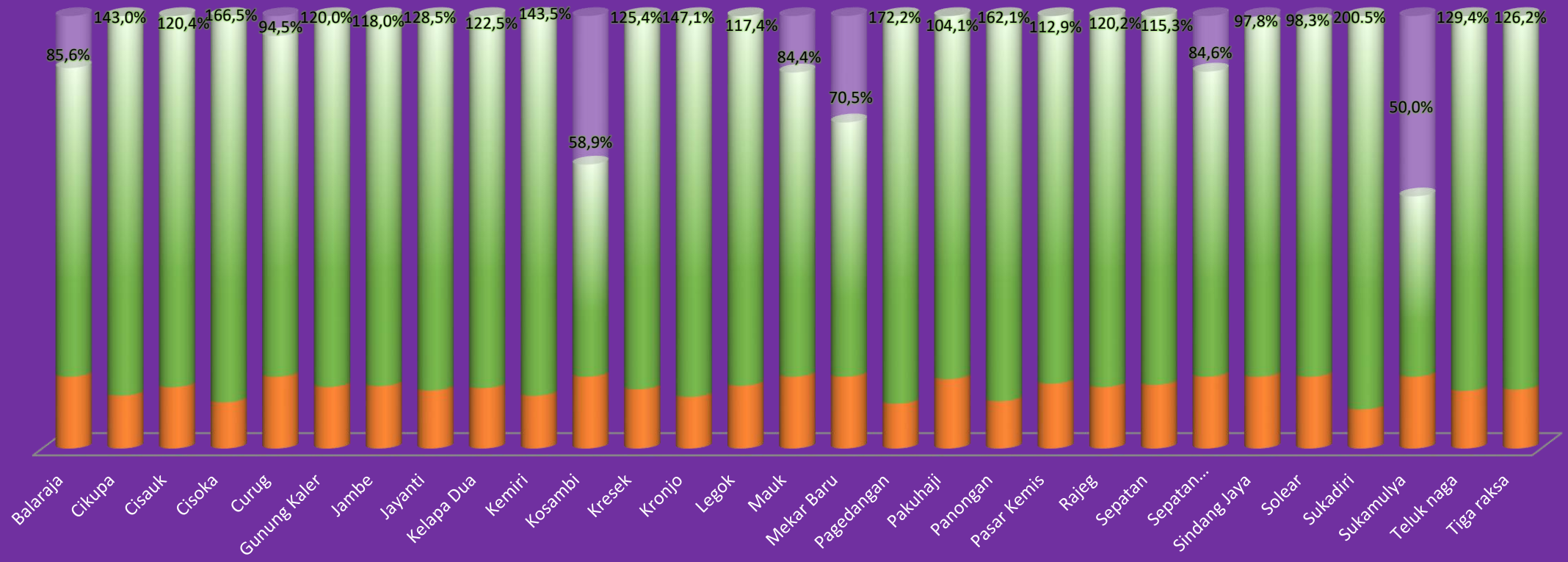
Jika dilihat pada Tabel di atas, ada beberapa Kecamatan yang masih kekurangan kursi untuk pelaksanaan belajar mengajar di SMP Negeri di Kabupaten Tangerang, semisal untuk Kecamatan Sukamulya hanya terpenuhi sebanyak 43,7% kebutuhan kursi, sedangkan sisanya 56,3% belum terpenuhi. Tetapi ada beberapa kecamatan yang alokasi kursinya berlebih (Lebih dari 100%) seperti di kecamatan Jambe dan Jayanti.

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Tahun 2019

PERSENTASE KETERSEDIAAN KURSI UNTUK PESERTA DIDIK DI SMP NEGERI KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2019

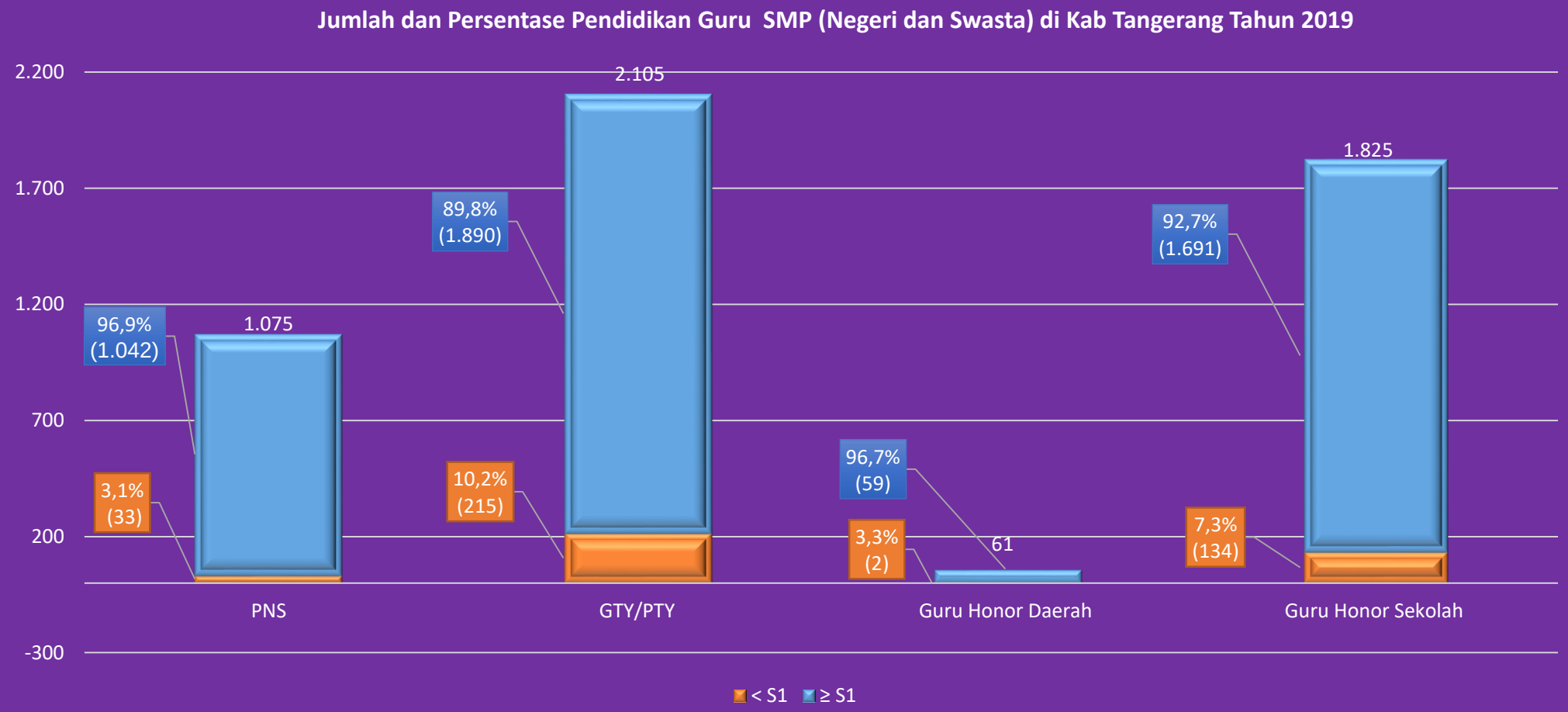
PERSENTASE KETERSEDIAAN MEJA (ASUMSI 1 MEJA UNTUK 2 ORANG) UNTUK PESERTA DIDIK DI SMP NEGERI KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2019

Persentase Ketersediaan Meja (Asumsi 1 Meja untuk 2 Orang) Untuk Peserta Didik di SMP Negeri Kabupaten Tangerang Tahun 2019



Sebagian Besar Kecamatan untuk ketersediaan Meja Kelas pada tingkat SMP Negeri cukup memadai bahkan lebih dari kebutuhan seperti Sukadiri ketersediaan Meja Kelas 200,5% sedangkan ada beberapa kecamatan yang justru kekurangan sarana meja kelas seperti Kecamatan Sukamulya, Kosambi da Mekar Baru, Mauk dan Sepatan Timur.

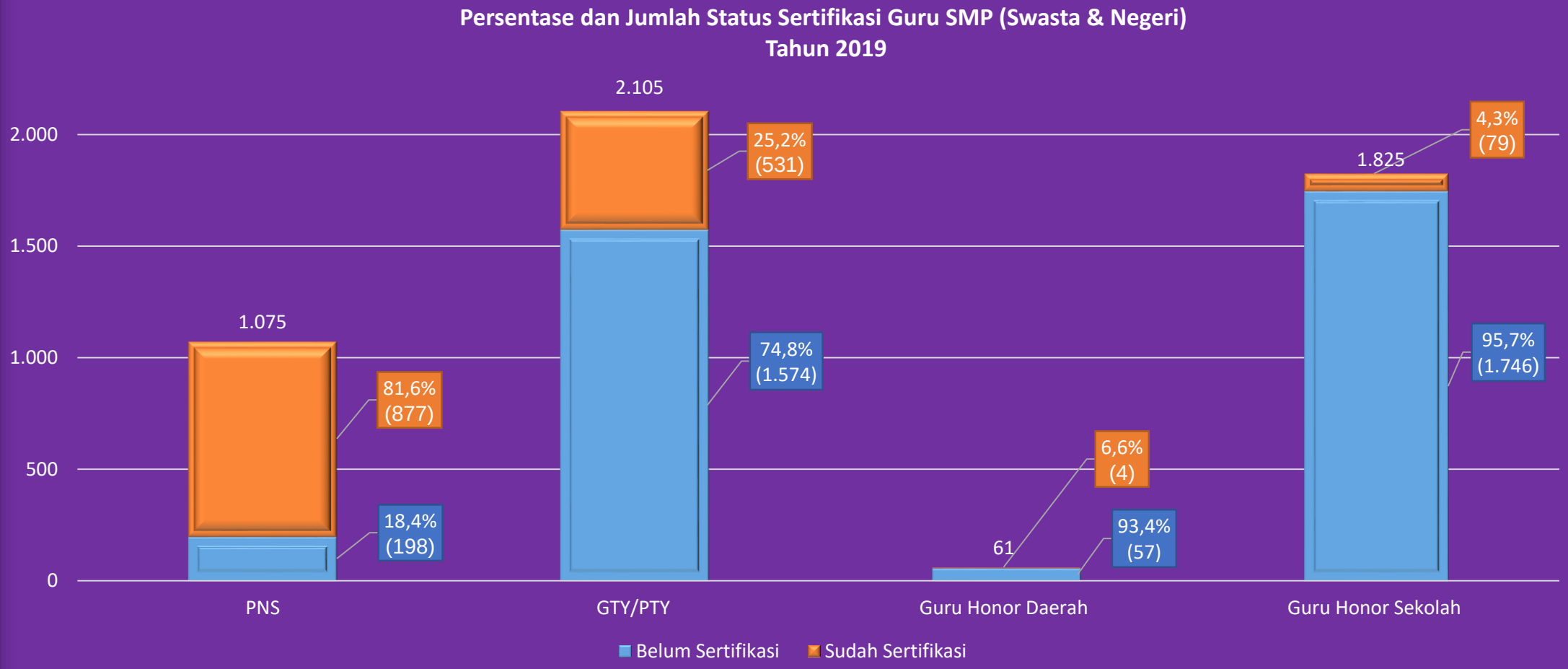
Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Tahun 2019



Sebagian besar Guru SMP Negeri Maupun Swasta di Kabupaten Tangerang sudah memiliki pendidikan S1 atau lebih, ada 3,1% (33 orang) Guru PNS yang belum memiliki Ijazah S1 atau lebih. Dilihat dari sisi persentase untuk GTY/PTY masih banyak yang belum memiliki ijazah S1 yaitu sebanyak 10,2% atau 215 orang.

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Tahun 2019

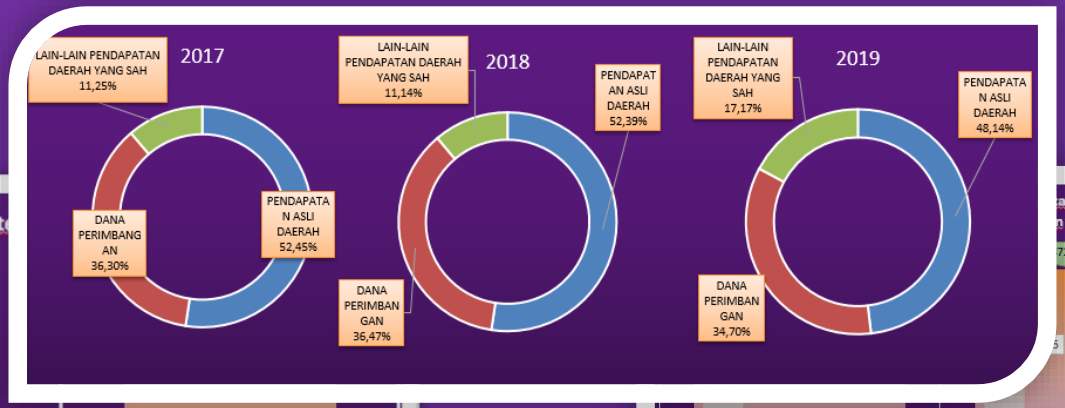
PERSENTASE KETERSEDIAAN MEJA (ASUMSI 1 MEJA UNTUK 2 ORANG) UNTUK PESERTA DIDIK DI SMP NEGERI KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2019

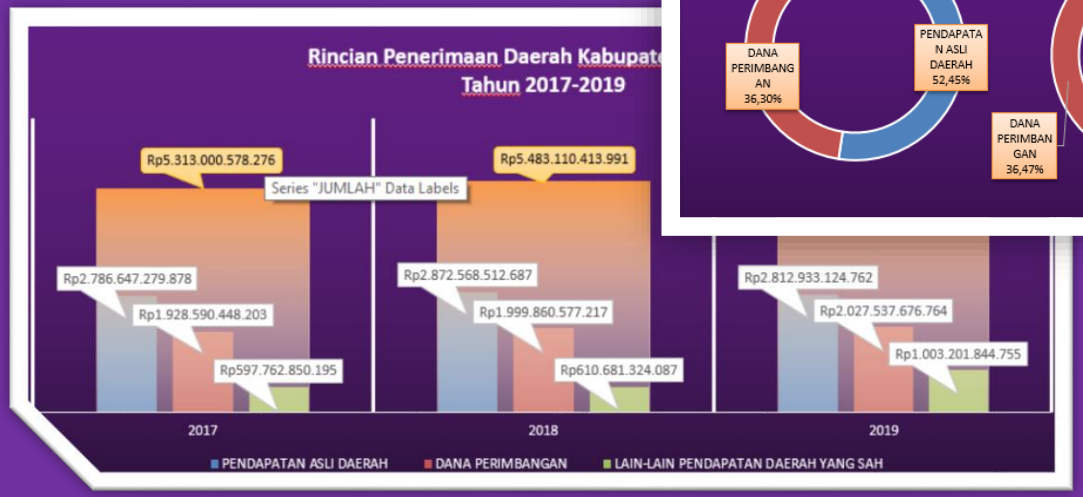


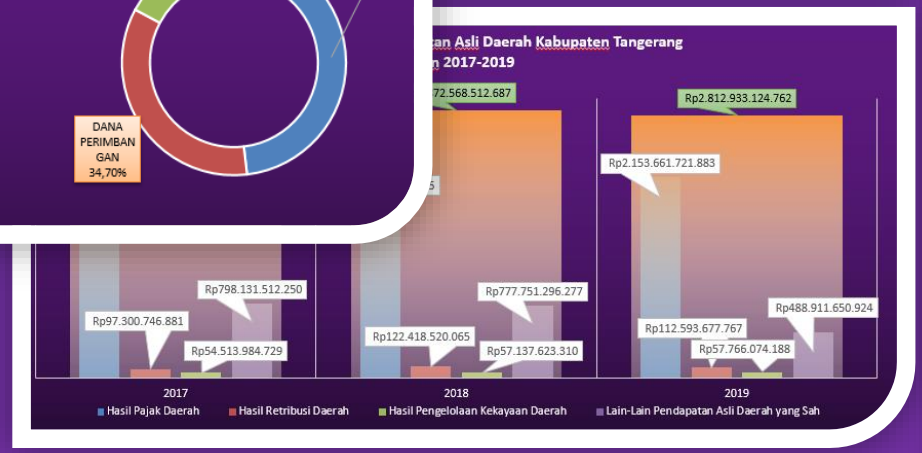
Sebagian besar Guru SMP yang berstatus PNS sudah bersertifikasi yaitu sebesar 81,6% (877 orang) sedangkan sisanya 18,4 % masih belum memiliki sertifikasi guru. Berbeda dengan guru GTY/PTY sebagian besar belum memiliki sertifikasi hanya 25,2% sudah memiliki sertifikasi guru.

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Tahun 2019

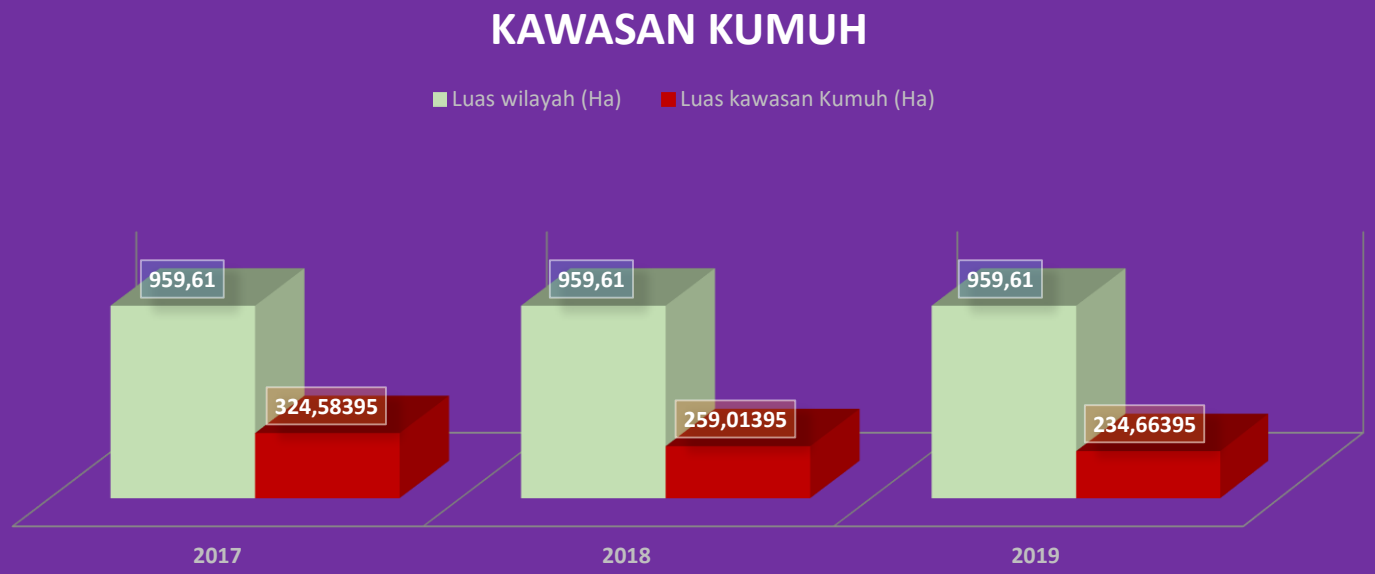
BAB 4
ANALISIS GRAFIK
URUSAN PEMUKIMAN



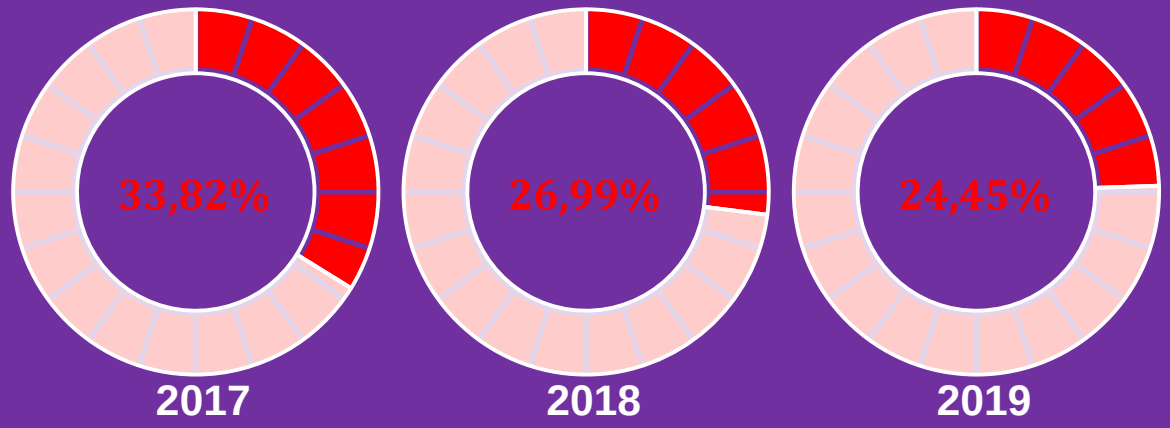




LUAS KAWASAN KUMUH DI KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2017-2019



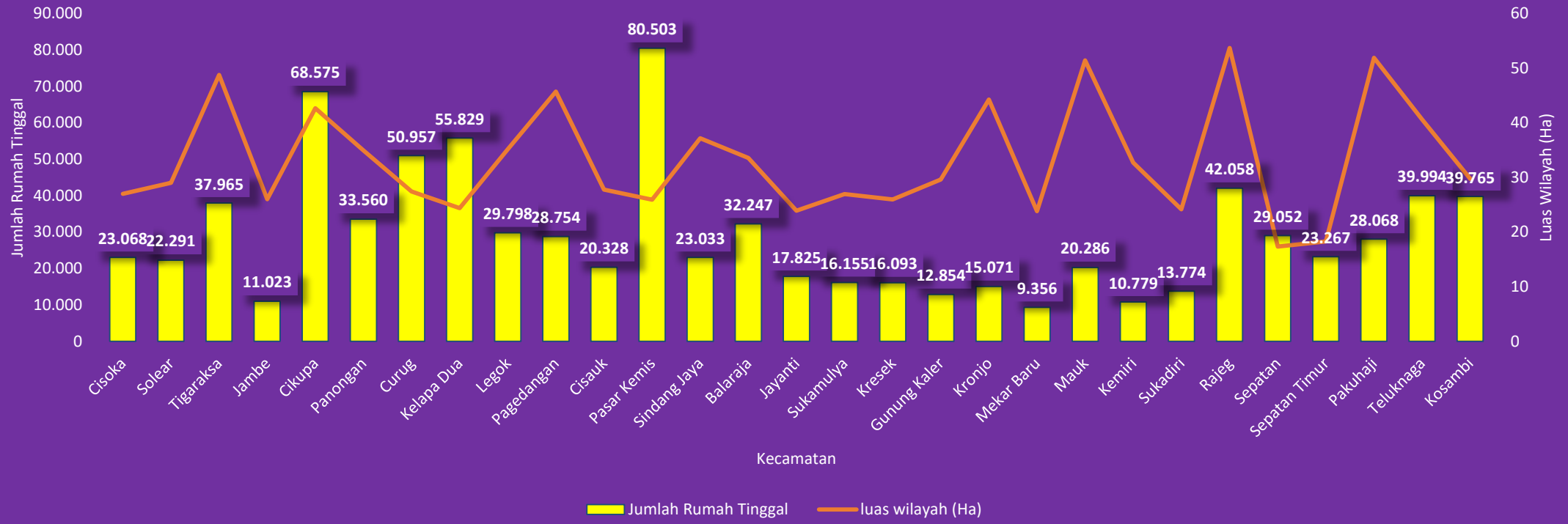
Persentase Kawasan Kumuh Terhadap Luas Wilayah Tahun 2017-2019



Luas Kawasan Kumuh di Kabupaten Tangerang dari tahun 2017 sampai dengan 2019 semakin menurun, dari tahun 2017 ke 2018 menurun sebanyak 6,83% sedangkan dari tahun 2018 ke tahun 2019 menurun sebanyak 2,54%

Sumber : Dinas Pemukiman, Perumahan dan Pemakaman Kabupaten Tangerang Tahun 2020

JUMLAH RUMAH TINGGAL TAHUN 2017
KABUPATEN TANGERANG

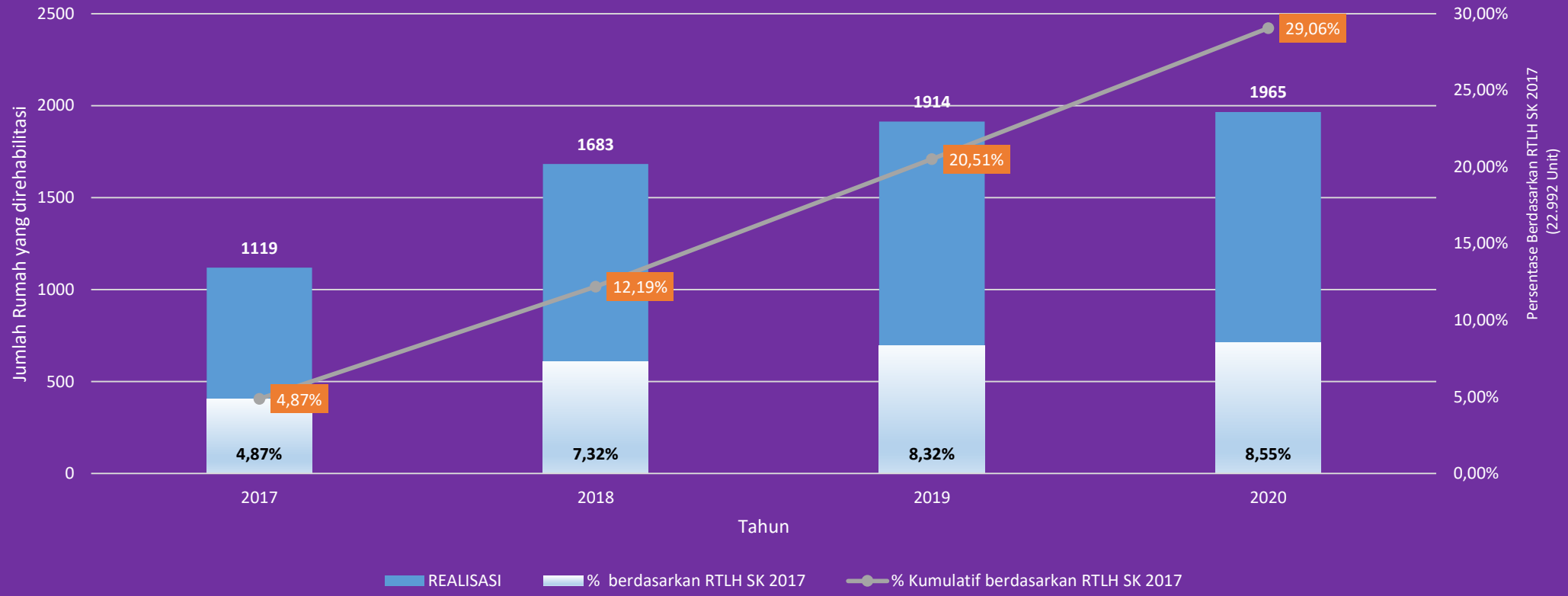


Berdasarkan banyaknya rumah tinggal di Kecamatan Pasar Kemis termasuk daerah yang padat penduduknya di bandingkan dengan Kecamatan lainnya dengan jumlah rumah tinggal berdasarkan data tahun 2017 sebanyak 80.503. Sedangkan Kecamatan yang Jumlah tempat tinggalnya sedikit adalah Kecamatan Mekar Baru. Jika dilihat perbandingan antara luas wilayah dan jumlah rumah tinggal ada beberapa daerah yang memiliki luas wilayah yang cukup luas tetapi rumah tinggalnya sedikit seperti Kecamatan Mauk, Kronjo, Pakuhaji dan beberapa Kecamatan lainnya.

Sumber : Dinas Pemukiman, Perumahan dan Pemakaman Kabupaten Tangerang Tahun 2020

JUMLAH REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DAN PERSENTASE CAPAIAN REHABILITASI BERDASARKAN RTLH SK 2017

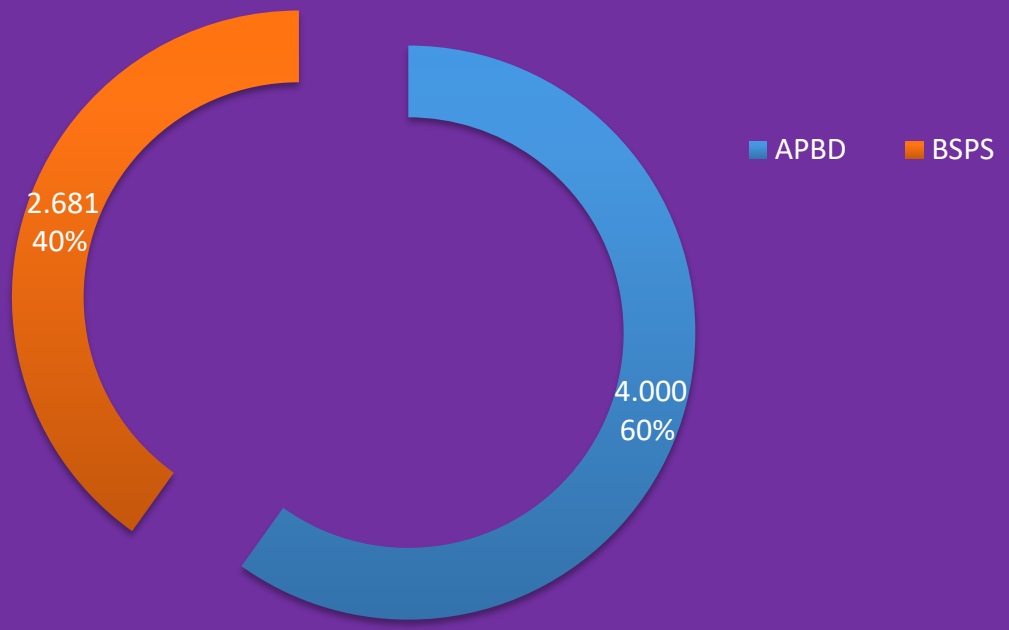
Jumlah Rehabilitasi Rumah Tidak layak Huni dan Persentase Capaian Rehabilitasi Berdasarkan RTLH SK Tahun 2017-2020



Berdasarkan Surat Keputusan Tahun 2017 bahwa Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 22,992 unit, sampai 2020 rumah tidak layak huni yang sudah di rehabilitasi sudah mencapai 29,06 %. Jika dilihat dari grafik dapat diketahui bahwa setiap tahun terdapat peningkatan jumlah rumah yang direhabilitasi. Jumlah rumah yang direhabilitasi terbanyak ada pada tahun 2020 yaitu sebanyak 1965 unit atau sebesar 8,55% dari target rumah Tidak Layak Huni berdasarkan SK Tahun 2017.

Sumber : Dinas Pemukiman, Perumahan dan Pemakaman Kabupaten Tangerang Tahun 2020

Alokasi Penggunaan Anggaran Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2017-2020

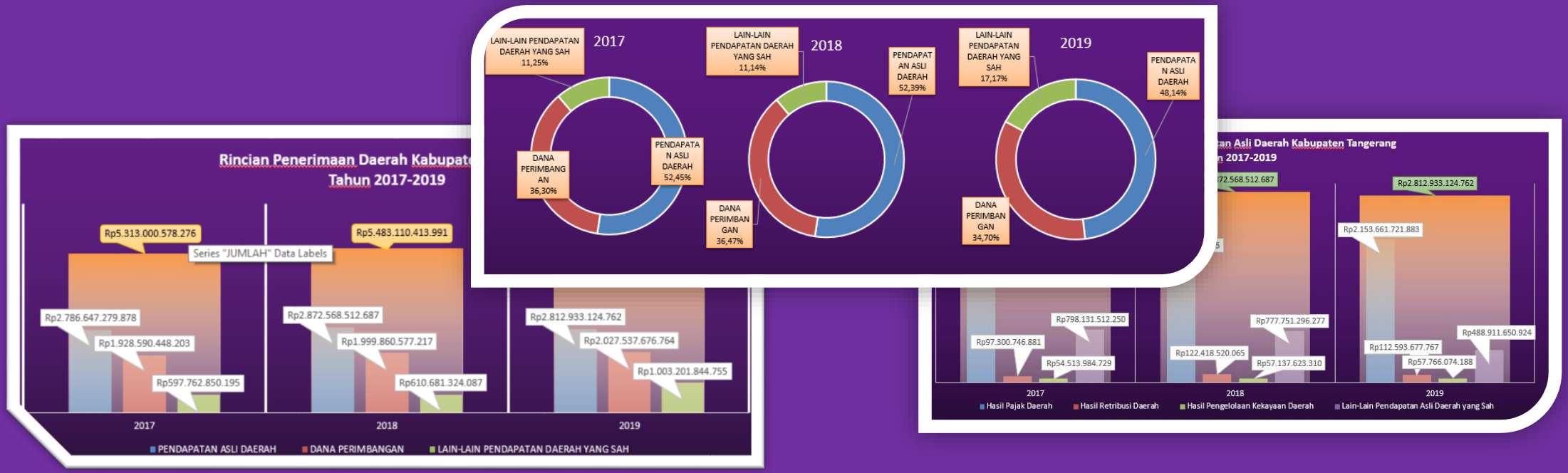


Jumlah Rumah yang sudah direhabilitasi dari tahun 2017-2020 adalah sebanyak 6.681 unit, dimana alokasi anggaran untuk pelaksanaan Rehabilitasi sebanyak 60% (4000 unit) menggunakan APBD melalui program GEBRAK PAKUMIS sedangkan 40% (2681 unit) menggunakan anggaran APBN Program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya)

Sumber : Dinas Pemukiman, Perumahan dan Pemakaman Kabupaten Tangerang Tahun 2020

ALOKASI PENGGUNAAN ANGGARAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI TAHUN 2017-2020

BAB 5
PENUTUP



Langkah-langkah Perbaikan

1. Akan terus dilakukan sosialisasi, bimtek, serta pembinaan kepada seluruh Perangkat Daerah agar dapat memahami statistik sektoral lebih dalam lagi sehingga nantinya Perangkat Daerah akan dapat mengolah data statistik sektoralnya dengan lebih baik dan maksimal.
2. Akan dilaksanakan kegiatan *Coaching Clinic* Statistik Sektoral Untuk Perangkat Daerah

QUOTE

"Adalah kesalahan umum untuk berteori sebelum memiliki data"

"Dengan Basis data dan informasi yang valid dan terukur, maka proses perencanaan pembangunan yang baik dan komprehensif akan menjadi titik penting untuk berhasilnya pembangunan"

Dokumen Laporan Statistik Sektoral Kabupaten Tangerang Tahun 2020







Ketiga buku tersebut sudah kami sampaikan ke Bappeda Kabupaten Tangerang, Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang serta BPS Kabupaten Tangerang untuk diterbitkan rekomendasinya.